

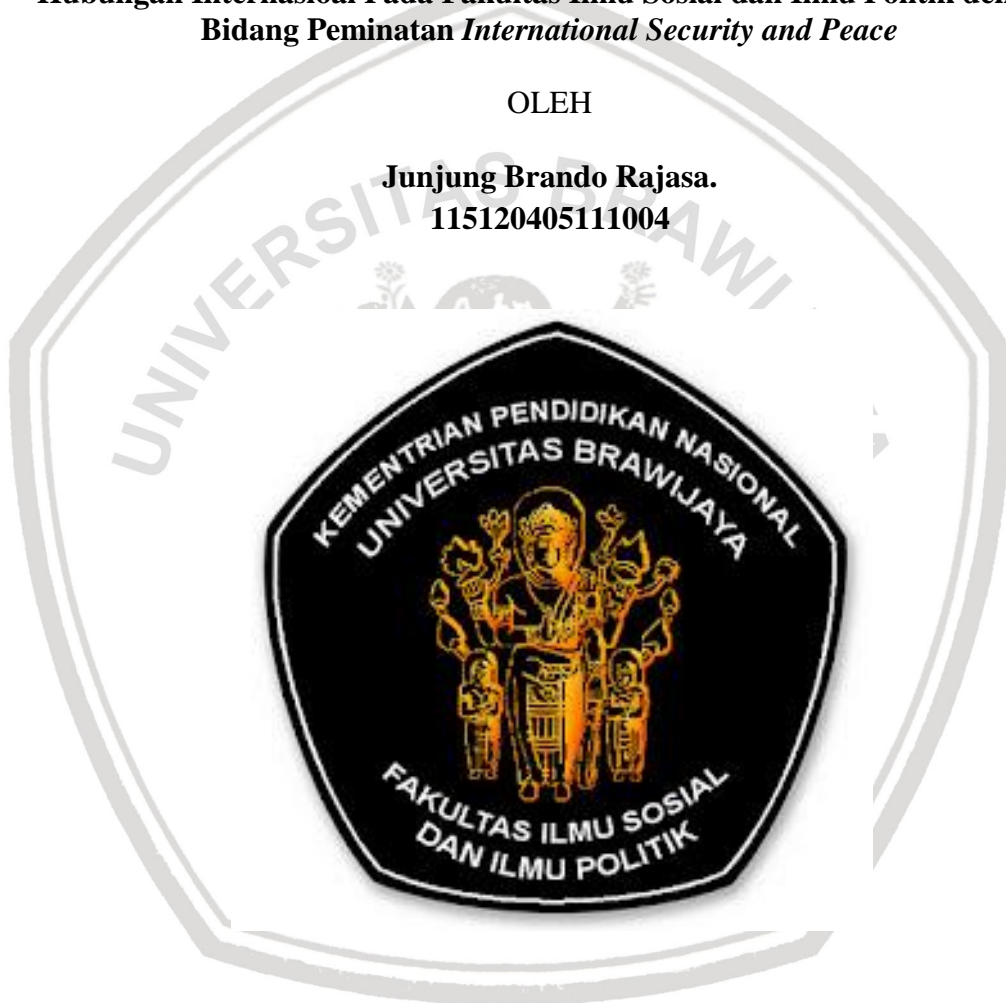
Efektivitas Kerjasama United Nations REDD Programme tahun 2011-2013 terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hubungan Internasional Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan
Bidang Peminatan *International Security and Peace***

OLEH

**Junjung Brando Rajasa.
115120405111004**



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA, MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS KERJASAMA UNITED NATION REDD PROGRAMME
TAHUN 2011-2013 TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI
INDONESIA**

Disusun Oleh:

Junjung Brando Rajasa

NIM. 115120405111004

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping *



Firstyarinda Valentia Indraswari, S.Sos., M.Si
NIK. 2013098602142001



Azwin Aryanto Aziz, S.IP., M. DevSt
NIP. 197802202010121001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Azwin Aryanto Aziz, S.IP., M. DevSt.
NIP. 197802202010121001

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIFITAS KERJASAMA UNITED NATION REDD PROGRAMME
TAHUN 2011-2013 TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI
INDONESIA

Disusun Oleh:

Junjung Brando Rajasa

NIM. 115120405111004

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana
pada tanggal 29 Juni 2018

Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji



Wishnu Mahendra Wiswayana, S.IP., M.Si.

NIK. 2017108906281001

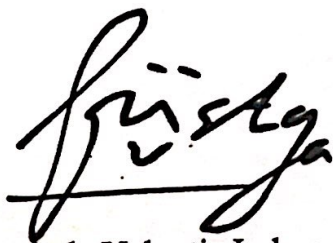
Sekretaris Majelis Penguji



Dewa Ayu Pntu Eva Wishanti, S.IP., M.Si.

NIK. 2013098708022001

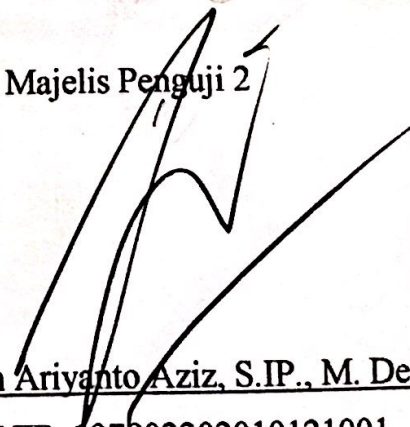
Anggota Majelis Penguji 1



Firstyarinda Valentia Indraswari, S.Sos., M.Si

NIK.2013098602142001

Anggota Majelis Penguji 2

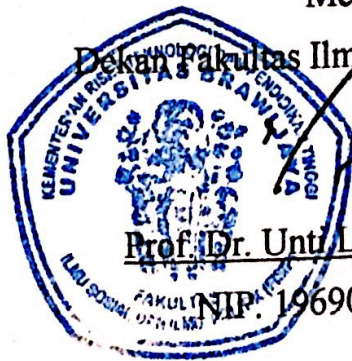


Azwin Ariyanto Aziz, S.IP., M. DevSt

NIP. 197802202010121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E, M.Si., AK.

NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Junjung Brando Rajasa

NIM : 115120405111004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"EFEKTIFITAS KERJASAMA UNITED NATION REDD PROGRAMME TAHUN 2011-2013 TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA"** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 29 Juni 2018

Yang membuat pernyataan,



Junjung Brando Rajasa

NIM. 115120405111004

KATA PENGANTAR

Terima kasih dan puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia, petunjuk, dan ijin yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kerjasama United Nations REDD Programme tahun 2009-2012 terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”**. Penelitian ini mendalami dan menganalisis efektivitas pelaksanaan kerjasama UN REDD Programme di Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini didukung dengan pendekatan lingkungan dan konsep sustainable development terkait analisis kebijakan tersebut. Tipe penelitian dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang menghasilkan data sekunder.

Hasil penelitian ini diharapkan Sebagai bahan kajian dalam membangun pemikiran dan pengembangan Ilmu Hubungan Internasional khususnya, dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Selain itu, juga diharapkan mampu memberi sumbangan informasi bagi peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian pada materi yang sama. Serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumbangan pemikiran atau masukan bagi pemerintahan suatu negara terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan.

Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa peneliti harapkan. Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca, dan penelitian selanjutnya.

Malang, 20 December 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Studi Terdahulu	12
2.2 Kerangka Konseptual	
2.2.1 Sustainable Development	19
2.2.2 Triple Bottom Line	21
2.2.3 Operasional Konsep	26
2.2.4 Alur Pemikiran	29
2.2.5 Argumen Utama	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	32
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	32
3.3. Teknik Pengumpulan Data	33
3.4. Teknik Analisis Data	33
3.5. Sistematika Penulisan	34
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Sejarah REDD+ di Indonesia	36
4.1.2 Visi dan Misi REDD+ di Indonesia	42
4.1.3 Tujuan REDD+ di Indonesia	42
4.1.4 Ruang Lingkup REDD+ di Indonesia	43
4.1.5 Prinsip REDD+ di Indonesia	43

4.1.6 Strategi REDD+ di Indonesia	44
4.1.7 Pendekatan REDD+ di Indonesia	46
4.1.8 Proses Kajian Tentang REDD+ di Indonesia	48
4.1.9 Pelaksanaan Kerjasama antara Indonesia dan United Nations REDD+ Programme	50
4.1.10 Pelaksanaan UN-REDD Programmed an REDD+ di Indonesia .	52
4.1.11 Strategi Nasional REDD+	56
4.1.12 Kerjsama Pemerintah Indonesia dengan negara lain dalam pelaksanaan UN+REDD Programe	58

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Sustainable Development	62
5.1.1 Needs	62
5.1.2 Limitation	70
5.2 Triple Bottom Line	74
5.2.1 Social	74
5.2.2 Economic	89
5.2.3 Environment	100

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	106
6.2 Saran	106

DAFTAR PUSTAKA	108
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Sustainable Development	20
Tabel 2.2 Tabel Operasionalisasi	28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tipe Obyektif dalam Sustainable Development	22
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam level internasional, sejak era tahun 1940-an telah terbentuk berbagai macam rezim internasional yang berfokus pada isu-isu lingkungan dan menjadi suatu agenda internasional.¹ *Environmental Change* merupakan perubahan lingkungan dimana teori politik hijau dalam kaitannya dengan teori hubungan internasional adalah sama-sama menjelaskan destruksi yang diakibatkan oleh manusia dan bagaimana sifat destruktif manusia tersebut juga dapat menciptakan masyarakat yang berkelanjutan apabila terdapat kesadaran bersama akan kehidupan yang lebih baik.²

Protokol Kyoto yang dibentuk pada tahun 1997 menekankan pada pentingnya perhatian negara-negara pada emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).³ Dalam Protokol Kyoto 1997 disebutkan bahwa negara-negara industrial dengan tingkat emisi karbon tinggi harus bersedia untuk mengurangi tingkat emisi karbon mereka dan memberikan kontribusi bagi pemeliharaan hutan di negara-negara berkembang. Sebagai tindak lanjut dari Protokol Kyoto, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk suatu program kerjasama bagi negara-negara berkembang yang diberi nama *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) pada tahun 2005. REDD merupakan suatu upaya untuk menciptakan nilai secara finansial dari karbon yang

¹ Dalby, Simon. 2003. *Security and Enviromental Change*. Cambrige: Polity Press.h. 261

² Robyn Eckersley (2010). 'Green Theory' dalam dalam Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith. *International Relation Theorie: second Edition*, New York: Oxford. h. 259.

³ Steni, Bernadinus. 2010. *Perubahan Iklim, REDD dan perdebatan hak: Dari Bali sampai Kopenhagen*. Epistema institute: http://epistema.or.id/wp-content/uploads/2015/07/Working_Paper_Epistema_Institute_03-2010.pdf, diakses pada tanggal 11 Maret 2018

dapat disediakan oleh hutan, dengan menawarkan sebuah mekanisme insentif bagi negara-negara berkembang yang memiliki dan mampu melindungi keberadaan hutannya sehingga mampu berkontribusi dalam menurunkan emisi dan insentif tersebut dapat diinvestasikan di sektor yang rendah emisi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.⁴

Mekanisme seperti di atas diperkenalkan melalui proses negosiasi oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang dibentuk bersama oleh organisasi PBB meliputi UNDP, UNEP dan FAO sejak pada tahun 2005 dan menghasilkan keputusan di tahun 2007, sebagai langkah untuk mencapai tujuan mengatasi perubahan iklim serta mengurangi emisi melalui manajemen hutan di negara-negara berkembang. Dengan melalui manajemen hutan, maka akan mengurangi adanya aktivitas yang berkaitan dengan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan mekanisme baru dalam hal pendanaan terhadap manajemen hutan secara berkelanjutan di negara-negara berkembang.⁵

*“Reduced deforestation and forest degradation may play a significant role in climate change mitigation and adaptation, can yield significant **sustainable development benefits**, and may generate a new financing stream for sustainable forest management in developing countries.”*

Sementara itu, orientasi pembangunan global kini mengarah pada pembangunan berkelanjutan atau yang lazim disebut juga dengan *sustainable development*. Konsep *sustainable development* sendiri muncul ketika sekitar tahun

⁴ Alika. 2012. Hutan, REDD+ dan Perubahan Iklim: <http://www.hijauku.com/2012/12/13/hutan-redd-dan-perubahan-iklim/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2018

⁵ UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD), FAO, UNDP, UNEP Framework Document, diakses pada tanggal 20 Februari 2018

1990an dimana negara-negara dunia mulai memberikan perhatian pada isu-isu kelestarian lingkungan. *Sustainable Development* atau Pembangunan Berkelanjutan adalah sebuah konsep dan paradigma pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan di masa yang akan datang. Pembangunan Berkelanjutan memiliki prinsip dasar yaitu tidak merusak atau membahayakan kelestarian lingkungan. Pembangunan dalam konsep *Sustainable Development* juga memberikan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, dan perlindungan lingkungan untuk generasi yang akan datang. *Sustainable Development* mencoba untuk memberikan jalan tengah antara pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan lingkungan

Tujuan dari UN REDD Programme adalah sebagai berikut:

“ Untuk mempersiapkan cadangan karbon dunia dalam menghadapi perubahan iklim. Konsep dari UN REDD Programme adalah memberi insentif bagi negara-negara berkembang yang mengurangi deforestasi dan degradasi lingkungan untuk menciptakan cadangan karbon dunia. Insentif diberikan oleh negara-negara Annex 1 dengan harga tertentu kepada negara-negara berkembang yang mampu mengelola kelestarian hutannya. Hal ini yang kemudian disebut sebagai perdagangan karbon. ⁶”

Di Indonesia, tujuan REDD dioperasionalkan ke dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam mencapai REDD-Readiness atau kesiapan REDD. Hasil yang diharapkan oleh kerjasama ini adalah 1) Memperkuat keterlibatan dan partisipasi multi-stakeholder melalui konsensus tentang isu kebijakan kunci kebijakan REDD, memberikan edukasi, dan program komunikasi yang kuat, 2) berhasil membangun *Reference Emission Level* (REL), *monitoring, reporting, and verification* (MRV) dan sistem pembayaran yang adil berdasarkan

⁶ CIFOR. 2010. REDD: Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim dan REDD. Center for International Forestry Research : http://www.cifor.org/publications/pdf_files/media/MediaGuide_REDD_Indonesian.pdf, diakses pada tanggal 13 Maret 2018

skema REDD nasional melalui peningkatan kapasitas untuk mengumpulkan persediaan karbon, referensi tingkat emisi, dan kesesuaian mekanisme pembayaran di tingkat provinsi, serta mencapai manfaat bersama dalam skema REDD. 3) Mendirikan kapasitas untuk penerapan REDD di tingkat desentralisasi sehingga REDD dapat menjangkau tingkat kabupaten dan pemangku kepentingan lokal bisa mendapatkan keuntungan. Dalam pelaksanaannya UN REDD bermitra dengan Kementerian Kehutanan sebagai aktor negara dan aktor non-negara seperti NGO lokal.

Kerjasama UN REDD beroperasi di 64 negara berkembang yang memiliki luas hutan tinggi, Didorong oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim tahun 2007 diadopsilah program yang sekarang dikenal dengan nama REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Plus Conservation), atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (plus) Konservasi. Tujuan REDD+ adalah “menghitung nilai dari karbon yang tersimpan di hutan, serta menawarkan insentif bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi dari lahan hutan dan tertarik untuk berinvestasi di jalur rendah karbon dalam rangka pembangunan berkelanjutan.”⁷

Dengan kata lain, REDD+ menyediakan kerangka kerja antar negara, termasuk pelibatan negara berkembang untuk mendapatkan bayaran (lewat sejumlah komitmen pembayaran berbasis kinerja, yang tergantung pada kesepakatan antara negara) untuk mengurangi laju deforestasi. Dana pembayaran ini mungkin berasal dari anggaran bantuan luar negeri dari negara-negara seperti

⁷ Food and Agriculture Organization Of The United Nations.2018. REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation: <http://www.fao.org/redd/initiatives/un-redd/en/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2018

Norwegia dan Australia, investasi dari perusahaan swasta, atau kombinasi keduanya Indonesia dan Norwegia menandatangani perjanjian bilateral REDD+ pada tahun 2010.⁸ Berdasarkan perjanjian ini, Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi karbon melalui penciptaan lembaga pemantauan dan pembatasan penggunaan lahan baru, serta penegakan ketat dari UU tentang Kehutanan. Sebagai gantinya, pemerintah Norwegia akan membayar pemerintah Indonesia hingga \$ 1 miliar, tergantung pada seberapa jauh target pengurangan emisi bertemu.

Di Indonesia, provinsi yang menjadi *pilot province*/ percontohan UN-REDD Programme adalah di Sulawesi Tengah. Penentuan Sulawesi Tengah didasarkan pada serangkaian kriteria seleksi, antara lain adalah masih ada deforestasi namun tutupan lahan masih relatif baik, kepadatan karbon yang relatif tinggi, dukungan politik daerah yang kuat, kapasitas daerah yang cukup kuat untuk mendorong tercapainya hasil yang cepat, penyebab deforestasi dapat dikenali dengan mudah, REDD di wilayah ini dapat menghasilkan manfaat yang signifikan, referensi pemerintah, serta belum adanya inisiatif REDD lainnya di wilayah ini.⁹

Beberapa alasan yang menjadikan Indonesia sebagai mitra dari UN REDD antara lain adalah kawasan hutan di Indonesia terdiri dari 60% luas wilayah daratan negara, menjadi daerah terbesar ketiga dari hutan hujan tropis secara global. Kawasan hutan di Indonesia penting bagi perekonomian nasional dan

⁸Shibao. 2015. REDD+, Sejauh Mana Keberhasilannya di Indonesia?: <http://www.mongabay.co.id/2015/04/22/redd-sejauh-mana-inisiatif-ini-berhasil-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2018

⁹ Noer. 2011. Implementasi Mekanisme REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah. UN-REDD Programme Indonesia: <https://noerdblog.wordpress.com/2011/11/28/sulawesi-tengah-menyongsong-implementasi-redd/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2018

kehidupan masyarakat lokal, sekaligus bagi lingkungan global. Kawasan hutan hujan Indonesia juga merupakan salah satu yang terkaya di dunia dalam hal keanekaragaman hayati. Diperkirakan luas hutan di Indonesia dalam jangka waktu antara tahun 2003 hingga 2006, mengalami degradasi kawasan hutan yang mencapai 1,17 juta hektar¹⁰. Dengan menjadi negara yang memiliki potensi luas hutan yang relatif besar sekaligus menjadi negara peringkat kedua dengan laju deforestasi terbesar di dunia¹¹, Indonesia menjadi salah satu negara prioritas bagi United Nations Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UN REDD) Programme, selain Brazil, Sudan, Zambia dan Mexico yang juga menjadi negara dengan laju deforestasi terbesar. Dengan persebaran deforestasi meliputi pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua.

Komposisi hutan di Indonesia antara lain: Kalimantan (32,0%); Papua (29,9%); Sumatra (20,8%); Sulawesi (9,7%); Maluku (5,5%); dan daerah-daerah lain (2,1%)¹². Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan berdasarkan SK penunjukan Menteri Kehutanan Nomor 757/ Kpts-II/ 1999 tanggal 23 September 1999 adalah seluas \pm 4.394.932 Hektar. Luas kawasan hutan ini mencakup 69,01% dari luas propinsi Sulawesi Tengah. Kawasan hutan ini terdiri dari kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi¹³.

¹⁰ The context of REDD+ in Indonesia. Giorgio Budi Indrarto *et al.* Center for International Forestry Research. 2012

¹¹Top Ten Countries with Highest Deforestation <http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/countries-with-highest-deforestation-map.html>. diakses tanggal 20 Mei 2014

¹²William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo. Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia:Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya Center for International Forestry Research Maret 1997. Occasional Paper No. 9. Hal. 1

¹³ Data dan Informasi Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah. Departemen Kehutanan. 2002

Faktor penyebab deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia berdasarkan hasil identifikasi dalam konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Bappenas bersama UN-REDD Programme Indonesia di wilayah regional Indonesia, antara lain adalah: 1) perencanaan tata ruang yang tidak efektif, 2) manajemen hutan yang kurang efektif, 3) kelemahan tata kelola di sektor kehutanan, 4) dan dasar hukum yang belum jelas dan lengkap serta penegakan hukum yang lemah.¹⁴ Penyebab lainnya adalah kepentingan domestik dan beberapa kebijakan pemerintah nasional, serta mengalami desakan dari kepentingan aktivitas bisnis seperti pertambangan.¹⁵

Tahap pelaksanaan dari Program UN REDD di Indonesia dimulai dari bulan Oktober 2009 hingga berakhir pada bulan Oktober 2012. Sebelumnya pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan seperangkat Undang-Undang dan aturan-aturan lain yang menunjukkan perhatian pemerintah Indonesia dalam menghadapi deforestasi dan *sustainable development*. Beberapa contohnya adalah; 1) Pembentukan Indonesian Forest-Climate Alliance (IFCA); 2) Perpres No. 46/2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim; 3) Permenhut No. 2 tahun 2008 tentang pelaksanaan proyek percontohan REDD; 4) Permenhut No. 30 tahun 2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan REDD; 5) Permenhut No.36 tahun 2009 tentang Prosedur Perijinan REDD; dan 6) PP No. 10/2010 tentang Penetapan Wilayah dan Prosedur Perubahan Fungsi Hutan.¹⁶ Sejak dimulai

¹⁴ Memahami Fenomena Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia. UN REDD Programme Indonesia. 2012. Diakses 20 Mei 2018. <http://redd-indonesia.org/index.php/regulasi/dinamika-redd>

¹⁵ Ilham. 2015. Ini Penyebab Deforestasi Hutan di Indonesia: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/31/np82eq-ini-penyebab-deforestasi-hutan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 15 Juli 2018

¹⁶ Forest Watch Indonesia. 2010. Inisiasi Kebijakan REDD di Indonesia; Menunggu Asa atau Masalah: <http://fwi.or.id/publikasi/inisiasi-kebijakan-redd-di-indonesia-menunggu-asa-atau-masalah/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2018

pada Oktober 2009, Program REDD telah bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait, LSM / CSO, akademisi dan sektor swasta baik di tingkat nasional dan provinsi. Program telah berperan dalam pengembangan beberapa keputusan seperti pengembangan metodologi untuk Tingkat Emisi Acuan dan pembuatan database Inventarisasi Hutan Nasional. Sebelum selesai Program juga akan menyiapkan rencana implementasi REDD+ Sulawesi Tengah. Pada tahun 2012, Indonesia telah bergerak menuju menyelesaikan indikator untuk Tata Kelola Participatory Assessment (PGA) dalam konteks REDD+.¹⁷

Tantangan dalam pelaksanaan UN REDD Programme ini yaitu adalah sikap pesimis dan kritik dari NGO internasional lain, salah satu contohnya adalah REDD-Monitor. REDD-Monitor berpendapat bahwa UN REDD Programme pada dasarnya hanya merubah konsep tentang mengurangi emisi menjadi pengurangan emisi berbayar. Negara-negara industrialis diharuskan untuk membayar kepada negara-negara pemilik hutan untuk setiap karbon yang berhasil dijaga.

Ada empat kritik yang ditujukan untuk UN REDD Programme; 1) *Leakage* atau kebocoran yang mengacu pada fakta bahwa sementara deforestasi sedang digalakkan, namun kerusakan hutan bisa berpindah ke daerah hutan lain yang tidak masuk dalam program REDD. 2) *Additionality* atau penambahan, mengacu pada ketidak mampuan memprediksi kemungkinan tanpa adanya proyek REDD. 3) *Permanent*, mengacu pada fakta bahwa karbon yang tersimpan di hutan hanya bersifat sementara, setelah pohon tersebut mati maka karbon akan kembali ke atmosfer. 4) *Measurement*, mengacu pada mekanisme dan akurasi ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah karbon yang tersimpan di hutan.

¹⁷ Profil REDD Indonesia. UN REDD Programme. diakses pada 20 Juni 2014. <http://www.un-redd.org/CountryActions/Indonesia/tabid/987/language/en-US/Default.aspx>.

Pada dasarnya kritik yang ditujukan kepada UN REDD ini didasarkan atas ketidakmampuan program tersebut untuk menghadirkan solusi yang komprehensif bagi permasalahan deforestasi di Indonesia. Beberapa problem di atas menunjukkan bahwa UN REDD memiliki berbagai kekurangan sebagai sebuah program yang ditujukan untuk membangun konsep *sustainable development*. Oleh karena itu, kritik terhadap program ini dilakukan oleh UN REDD Monitor.

UN REDD Programme juga mendapat tantangan yang berbeda-beda dari setiap negara. Ane Evenstad et.al dalam papernya menjelaskan tentang bagaimana REDD adalah sebuah usaha untuk menyelamatkan hutan dan memberi manfaat bagi masyarakat lain, namun disaat yang sama juga dapat membawa dampak seperti memaksa masyarakat meninggalkan lahan mereka, menghancurkan ekosistem alam demi maksimalisasi karbon, dan menciptakan ketimpangan baru.¹⁸ Ane Evenstad et al. juga membandingkan tantangan UN REDD Programme di Indonesia, Brazil, dan Tanzania. Ketiga negara tersebut adalah negara-negara yang menerima keuntungan karbon dari Norwegia selaku mitra perdagangan karbon.

Salah satu permasalahan pokok dalam UN REDD Programme adalah hak kepemilikan tanah. Di Indonesia sendiri, kepemilikan tanah khususnya tanah adat akan menjadi permasalahan jika wakil-wakil politik tidak mewakili kepentingan masyarakat adat tersebut, terlebih lagi jika tanah yang akan digunakan untuk program REDD juga dalam sengketa dengan perusahaan. Sementara *Non-Governmental Organization* (NGO) lokal cenderung bersikap paradoks jika berkaitan dengan donor asing. Ketergantungan NGO lokal pada donor asing akan

¹⁸ Evenstad, Ane et al. "II. Country Cases: Indonesia, Tanzania, Brazil" Insight From The Field. Norwegian REDD Research Network [online] (eds) 2013. diakses pada 19 April 2017. <http://www.sum.uio.no/english/research/publications/2013/brief-2-countries.pdf>

cenderung mempengaruhi posisi dan legitimasi mereka dalam masyarakat lokal. Baik wakil politik dan NGO lokal sama-sama belum tentu untuk berpihak kepada masyarakat lokal. Dengan demikian pelaksanaan REDD menjadi rapuh karena penghubung antara REDD dan masyarakat lokal belum berjalan maksimal.¹⁹

Walaupun demikian UN REDD Programme dalam laporannya pada tahun 2012 yang berjudul “*Participatory Government Assessment: The 2012 Indonesia’s Forest, Land, and REDD+ Governance Index*” menyatakan bahwa UN REDD Programme berhasil mendorong pertumbuhan *sustainable development* di Indonesia terbukti dengan dipenuhinya indikator-indikator seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui serangkaian aturan dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan UN REDD.²⁰ Selain itu, melihat dari keberhasilan UN REDD Programme, kerjasama kemudian dilanjutkan dengan UN REDD+ yang dimulai pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara UN REDD Programme dengan konsep *sustainable development* yang memiliki tujuan pokok menciptakan pembangunan dunia yang berkelanjutan dan berorientasi kelingkungan. Sedangkan UN REDD Programme sebagai usaha dari PBB untuk menciptakan cadangan karbon yang cukup dan mengurangi emisi global. Dengan demikian menarik untuk diteliti kembali tentang efektivitas UN REDD Programme dalam mendorong pertumbuhan *sustainable development* di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Efektivitas Program United Nations REDD**

¹⁹*Ibid*

²⁰ Situmorang, Nababah, Khatarina, dkk. 2013. Participatory Governance assessment: THE 2012 INDONESIA FOREST, LAND AND REDD+ GOVERNANCE INDEX. UnDP indonesia, isBn 978-602-96539-6-0

Programme tahun 2009-2012 terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menarik rumusan permasalahan efektivitas program United Nations REDD Program 2009-2012 dalam mendorong pertumbuhan *sustainable development* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan UN REDD Program di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program UN REDD Programme dalam menangani deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui efektivitas REDD untuk menciptakan mekanisme pengelolaan hutan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Peneliti dapat menggali seluas-luasnya mengenai REDD+ dan implikasinya bagi aktor yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.

2.Praktis

a.Sebagai laporan skripsi tugas akhir studi Hubungan Internasional Strata-1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya Malang.

b.Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan bahan masukan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan terutama peneliti sendiri agar dapat digunakan sebagai bahan komparasi penelitian sejenis, maupun untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Terdahulu

Membicarakan tentang *sustainable development* memang tidak bisa dilepaskan dari kajian-kajian lingkungan yang muncul pada sekitar tahun 1980an. *Sustainable development* sendiri menjadi diskursus dalam Ilmu Hubungan Internasional sejak adanya Brundtland Report pada 1987 yang dikeluarkan oleh World Commission on Environment and Development.²¹ Dalam Brundtland Report yang berjudul *Our Common Future*, dijelaskan mengenai konsep dasar tentang *sustainable development* itu sendiri. Bahwa *sustainable development* adalah suatu konsep tentang pembangunan dunia yang memadukan antara pemenuhan kebutuhan saat ini dengan tidak mengabaikan kebutuhan generasi masa depan. Sustainable development berpatokan pada *needs* dan *limitations*. *Needs*, yang mengacu pada tidak hanya kebutuhan ekonomi bagi kaum pemodal, namun juga kebutuhan ekonomi bagi kaum miskin, dalam hal ini adalah masyarakat lokal dan kelompok adat. Selain itu *needs* juga dapat diartikan sebagai kebutuhan sosial bagi kelompok-kelompok tersebut, khususnya adalah kebutuhan tentang akses sosial dan pemberdayaan.²²

Komisi Brundtland mengkritisi konsep pembangunan yang selama ini digunakan oleh negara-negara dunia. Bahwa pada dasarnya antara pemenuhan kebutuhan (*needs*) haruslah diprioritaskan untuk masyarakat miskin terlebih dahulu yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Namun pada dasarnya

²¹Nama Brundtland Report merujuk pada ketua tim World Commission on Environment and Development (WCED), Gro Harlem Brundtland. 2015

²² Brundtland Commission. Report of the World Commission on Environment and Development. United Nations. 1987

pemenuhan kebutuhan (*needs*) terhalang oleh keterbatasan (*limit*) yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Salah satu bentuk keterbatasan adalah teknologi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, komisi Brundtland mencari jalan tengah antara pemenuhan kebutuhan dan keterbatasan melalui pendekatan kemanusiaan.²³ Laporan Komisi Brundtland ini kemudian disambut positif oleh PBB dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum 42/187 pada 11 Desember 1987. Hal ini juga menjadi tonggak bangkitnya kesadaran negara-negara dunia tentang lingkungan hidup yang ditandai dengan penyelenggaraan konferensi-konferensi lingkungan di beberapa kota di dunia. Dalam berbagai putaran perundingan itu, kemudian diselenggarakanlah Protokol Kyoto 1997. Hasil dari Protokol Kyoto adalah kesepakatan tentang kompensasi yang diberikan negara-negara Annex 1 kepada negara-negara berkembang sebagai kontribusi dalam menjaga dan melindungi kelestarian hutan. Atas Protokol Kyoto inilah kemudian dibentuklah mekanisme kerjasama melalui UN REDD Programme.

Chichilnisky dalam tulisannya yang berjudul “What is Sustainable Development?” memberikan kesimpulan bahwa dalam yang dimaksud *sustainable* adalah hubungan kerjasama perdagangan lintas generasi, tanpa salah satu generasi yang lebih superior.²⁴ Yang dimaksud dengan kerjasama perdagangan lintas generasi adalah ketika suatu generasi bersedia untuk mengeluarkan dana untuk apa yang akan didapat oleh generasi selanjutnya.²⁵ Berbeda dengan Chichilnisky, Robinson dkk lebih mengemukakan pandangan bahwa *sustainable development* dilatar belakangi oleh kondisi perubahan iklim global. Oleh karena bahwa

²³*Ibid*

²⁴Chichilnisky, Graciela.”*What Is Sustainable Development?*”. Land Economics, Vol.73, No.4, Defining Sustainability. University of Wisconsin Press. 1997

²⁵*Ibid*, 485

perubahan iklim adalah permasalahan global, maka diperlukan juga aksi kolektif negara-negara bangsa dalam usaha-usaha mewujudkan *sustainable development*.²⁶ Baik Chichilnisky dan Robinson sama-sama melihat diperlukannya usaha-usaha kolektif dalam mewujudkan *sustainable development*.

Hartmut Bossel²⁷ salah satu peneliti dari International Institute for Sustainable Development (IISD), menerbitkan karya berjudul *Indicators for Sustainable Development: Theory, Methods, and Applications*. Menurutny²⁸ bahwa, *sustainable development* adalah sebuah konsep yang dinamis. Menjadi dinamis karena bahwa dunia adalah sebuah realita berkembang seiring dengan waktu. Perubahan manusia dan lingkungan kehidupannya adalah sebuah keniscayaan. Hal ini kemudian yang membuat penetapan definisi tunggal atas *sustainable development* adalah hal yang kurang tepat. Bossel kemudian menawarkan alternatif dengan memberikan sejumlah indikator *sustainable development*, dengan harapan bahwa indikator tersebut dapat membantu menjelaskan apakah suatu fenomena tergolong *sustainable development* atau tidak. Dalam penelitiannya, Bossel melakukan penelitian *sustainable development* di New Zealand. Bossel menggunakan tujuh indikator, yaitu: 1) *existence*, 2) *effectiveness*, 3) *freedom of action*, 4) *security*, 5) *adaptability*, 6) *coexistence*

²⁶ Robinson, John et.al. "Climate Change and Sustainable Development: Realizing the Opportunity". *Ambio*, Vol. 35, No.1. 2006

²⁷ Bossel, Hartmut. *Indicators for Sustainable Development: Theory, Method. Applications*. International Institute for Sustainable Development. Jerman. 1999.h. 141

²⁸ Ibid., h.142

psychological needs.²⁹ Indikator tersebut kemudian digunakan untuk menganalisa fakta-fakta lapangan tentang pembangunan di New Zealand.³⁰

Sementara itu, REDD adalah sebuah aksi kolektif yang dilakukan oleh negara-negara Annex 1 dalam usaha-usaha mengurangi emisi global. Christoph Schwarte³¹ dalam *Social Safeguards in REDD* menyatakan keberhasilan Pelaksanaan komitmen internasional dalam level nasional tergantung pada kehendak dan kemampuan negara untuk mempengaruhi aktivitas-aktivitas berkenaan dengan perlindungan hutan di tingkat domestik.³² Seringkali dalam perencanaan hingga pembuatan kebijakan tidak melibatkan masyarakat sekitar atau *indigeneous people*, sehingga perlu adanya usaha untuk melibatkan masyarakat sejak awal perencanaan hingga proses implementasi kebijakan dan pembuatan undang-undang yang ada, sehingga kredibilitas dari sistem atau mekanisme tersebut terjamin, dan masyarakat lokal yang mengetahui kondisi di daerahnya sekaligus tidak mensubstitusi/ menggantikan kearifan lokal dalam hal manajemen hutan yang sebenarnya sudah ada dalam masyarakat.

Dalam tulisan Mwakalobo et. al tentang bagaimana REDD diterapkan di Tanzania dijelaskan bahwa walaupun REDD adalah hasil dari konsensus bersama tentang perubahan iklim dan *sustainable development*, namun pada dasarnya masih banyak kekurangan dari UN REDD Programme itu sendiri.³³ Mwakolobo et.al mendeskripsikan tentang bagaimana UN REDD diterapkan di Tanzania.

²⁹Bossel, Hartmut. "*Indicators for Sustainable Development: Theory, Methods, Applications*" A Report to the Balaton Group. International Institute for Sustainable Development. 1999

³⁰*Ibid*

³¹ Christopher, Mark. *Water Wars: The Brahmaputra River and Sino-Indian Relations*. US Naval War College. Center on Irregular Warfare and Armed Groups. Newport. Rhode Island

³² *Social Safeguards in REDD: A Review of Possible Mechanisms to Protect the Rights and Interests of Indigenous and Forest-Dependent Communities in a Future System for REDD*. McGill journal Volume 6: Issue 1.2010

³³Mwakalobo et.al. *REDD Working Papers: REDD and sustainable development – perspective from Tanzania* IIED, London. 2011

Menurutnya bahwa dalam pemilihan lokasi UN REDD Programme ada beberapa prasyarat yang diperlukan diantaranya telah adanya *National Framework* atau Kerangka Kerja Nasional tentang pengelolaan hutan berbasis *sustainable development*, adanya peran *local civil society* dalam usaha pemeliharaan hutan, serta adanya keterlibatan masyarakat adat dalam pemeliharaan hutan.³⁴

Dalam mekanisme pembayarannya, UN REDD Programme di Tanzania menerapkan empat macam mekanisme, antara lain: 1) Clean Development Mechanism (CBM), 2) Market Based Mechanism (MBM), 3) Non-market Based Mechanism, dan 4) Dual-Market Mechanism (DMM). Selain itu dalam pelaksanaannya terdapat mekanisme Community Based Forest Management (CBFM) dalam REDD yang diimplementasikan di wilayah Hutan Tanzania, di mana telah mampu melaksanakan program REDD secara sukses dengan melibatkan masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap hasil hutan, meskipun demikian tetap terdapat kontrol pemerintah terhadap status kawasan hutan tersebut, masyarakat sekitar boleh memanfaatkan sekaligus berkewajiban untuk melindungi bersama pemerintah dan REDD, tetapi status dari lahan tersebut adalah lahan milik pemerintah untuk menghindari adanya penyalahgunaan. Implementasi UN REDD Programme di Tanzania meliputi beberapa aksi konkrit yang dilakukan oleh REDD antara lain; 1) Aktivitas aforestasi dan reforestasi, 2) Perlindungan hutan yang sudah ada, 3) Promosi penggunaan sumber energi alternatif dan efisiensi penggunaan biomass, 4) Mempromosikan inovasi yang berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon, dan 5) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam aktivitas REDD.

³⁴*Ibid*

Sustainable Development yang diperoleh dari Tanzania dengan mekanisme tersebut adalah adanya tindakan reforestasi dan aforestasi, kemudian perlindungan terhadap hutan yang ada, pengusahaan alternatif selain sumber daya yang berasal dari hutan, menghindari aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan dan terakhir meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan adanya kompensasi atas perlindungan hutan tersebut. oleh karena itu Tanzania sukses dalam melaksanakan REDD dalam rangka pembangunan berkelanjutan dengan memenuhi aspek *limitation* dan *need*.

Kajian tentang REDD di Indonesia oleh Lima et.al (nd) dalam Gupta et.al. (eds) memberikan deskripsi yang runtut mengenai penerapan REDD di Indonesia. Menurutny bahwa REDD harus dipahami sebagai satu usaha untuk tidak hanya mencapai tujuan pengurangan deforestasi dan degradasi lingkungan, tapi juga bertujuan untuk dapat mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) melalui pemberian insentif kepada negara-negara pemilik hutan untk mengurangi emisi hingga ambang batas yang sudah ditetapkan.³⁵ Ada beberapa sebab utama yang mendasari terjadinya deforestasi dan degradasi lingkungan di Indonesia; 1) *Illegal logging*, dimana perusahaan lokal dan multinasional melakukan pembalakan hutan secara liar untuk memenuhi permintaan kayu yang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. 2) Pembukaan lahan pertanian, perusahaan-perusahaan besar yang rata-rata memproduksi minyak sawit melakukan pembukaan lahan untuk ditanami pohon sawit. 3) Industri pertambangan, perusahaan tambang baik BUMN atau swasta membuka area tambang di wilayah hutan, seringkali adalah tambang batubara dan nikel. 4)

³⁵Gupta, Joyeeta et.al. (eds). "Climate Change, Forest, and REDD: Lesson for Institutional Design". Routledge. New York. 2013

Kebakaran hutan, baik oleh manusia atau factor alam, kebakaran hutan juga menjadi faktor utama deforestasi.³⁶ Sementara itu, faktor tidak langsung yang juga mendasari terjadinya deforestasi antara lain adalah: 1) Pertumbuhan ekonomi, pemerintah berasumsi bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan dapat dicapai dari pembukaan hutan untuk keperluan industri dengan harapan industri akan menggerakkan ekonomi mikro masyarakat sekitar. 2) tingginya permintaan global atas komoditas hutan seperti kayu, kertas, dan sumber daya lain. 3) tingginya permintaan global akan lahan subur untuk digunakan sebagai pertanian.³⁷

Dalam Strategi Nasional REDD, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Norwegia untuk mengurangi emisi dari perubahan hak pengelolaan hutan. Pemerintah Indonesia menerima 1 miliar US Dollar dari pemerintah Norwegia untuk bersedia keperluan bantuan asistensi pengembangan. Hal itu juga termasuk memberlakukan moratorium ijin alih fungsi hutan selama 2 tahun. Kebijakan ini berlaku mulai Mei 2011 hingga Mei 2013, di mana baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan ijin alih fungsi hutan.³⁸

Komisi Burndtland, Chichinilsky dan Robinson membantu penulis dalam mencari definisi *sustainable development*, yang sangat penting digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan indikator-indikator *sustainable development* oleh Hartmut Bossel akan digunakan penulis untuk membantu dalam menganalisa kasus, tentunya dengan bahan tambahan teori yang akan dijelaskan kemudian.

³⁶Lima et.al dalam Gupta (eds). "Climate Change, Forest, and REDD: Lesson for Institutional Design". Routledge. New York. 2013

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*

Sedangkan studi-studi tentang implementasi UN REDD Programme akan digunakan untuk membantu penulis dalam memahami contoh keseluruhan implementasi program di negara-negara lain selain Indonesia yang dapat digunakan untuk perbandingan.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 *Sustainable Development*

Sustainable Development atau Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu prinsip dalam pembangunan di mana pembangunan yang dilakukan saat ini tidak merusak atau membahayakan kebutuhan generasi yang akan datang. Meskipun hingga saat ini telah banyak berbagai pihak yang menggunakan konsep atau kata *sustainable development*, tetapi definisi yang dapat diterima secara umum masih terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Hal ini menyebabkan perbedaan definisi konseptual antara beberapa ilmuwan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan definisi konsep *sustainable development* dari Komisi Brundtland menyatakan; “*Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*”³⁹

Di dalam Brundtland Report, dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan membawa dua konsep kunci, yaitu *limitation* atau batasan dan *needs* atau kebutuhan. Pertama yang akan dibahas yaitu *limitation* berarti dalam konsep *sustainable development* terdapat suatu batasan. Batasan yang dimaksudkan disini bukanlah batasan mutlak, tetapi batasan tersebut adalah relatif. Melainkan

³⁹ Brundtland Commission. Report of the World Commission on Environment and Development. United Nations. 1987

batasan relatif dari teknologi yang digunakan saat ini digunakan serta ketidakmampuan organisasi sosial dan lingkungan dalam melakukan regenerasi dari dampak aktivitas manusia. Teknologi dan Organisasi Sosial tersebut juga dapat digunakan untuk mengatur dan menciptakan alternatif baru bagi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan *Needs* dalam konsep *Sustainable Development* memiliki pengertian bahwa semua pihak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka yang miskin mendapatkan jaminan bahwa mereka disediakan akses yang adil terhadap sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Akses untuk pemenuhan kebutuhan menjadi penting disini. Oleh karena itu perlu adanya sistem politik yang mampu menjaga partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan baik secara nasional maupun internasional.⁴⁰

Selain itu, dalam pembangunan berkelanjutan juga terdapat dimensi waktu dan tempat (*time and place*). Dimensi waktu berarti eksplorasi sumber daya yang dilakukan pada saat ini serta apapun keputusan yang diambil oleh generasi yang hidup pada saat ini akan memberikan pengaruh terhadap generasi selanjutnya. Sedangkan dimensi tempat menjelaskan bahwa tindakan atau aktivitas yang merusak lingkungan yang dilakukan di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap generasi selanjutnya.

Tabel 2.1 Tabel *Sustainable Development* ⁴¹

	Economy	Social	Environment
Need	growth, effeciency, sustainability	employment, equity, security, education, health, participation, identity	healthy environment, renewable resources, non-renewable natural resources

⁴⁰*Ibid.* Poin 27-30.

⁴¹ United Nations. Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. New York: United Nations. 2007

Limit	Capital	participation, identity	Technology
-------	---------	----------------------------	------------

Sumber : United Nations Publication

2.2.2 Triple Bottom Line

Triple Bottom Line adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa sebuah pembangunan dikatakan sebagai pembangunan berkelanjutan apabila memenuhi tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan. Selain itu juga memperhatikan bagaimana untuk membangun kondisi sosial masyarakat yang lebih baik, namun juga tetap memperhatikan kelestarian kondisi lingkungan.⁴² Oleh karena itu, sangat jelas bahwa menyeimbangkan begitu banyak sasaran/tujuan dari ketiga pilar pembangunan tersebut merupakan tantangan yang sangat besar bagi negara manapun, di mana harus memilih apakah ingin memperoleh nilai keamanan nasional yang lebih besar dengan konsekuensi nilai negatif dari pertumbuhan ekonomi, misalnya kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Maka keputusan tersebut untuk mencerminkan kepentingan mayoritas, pemerintah harus mengambilmnya dengan cara yang paling demokratis dan partisipatif.

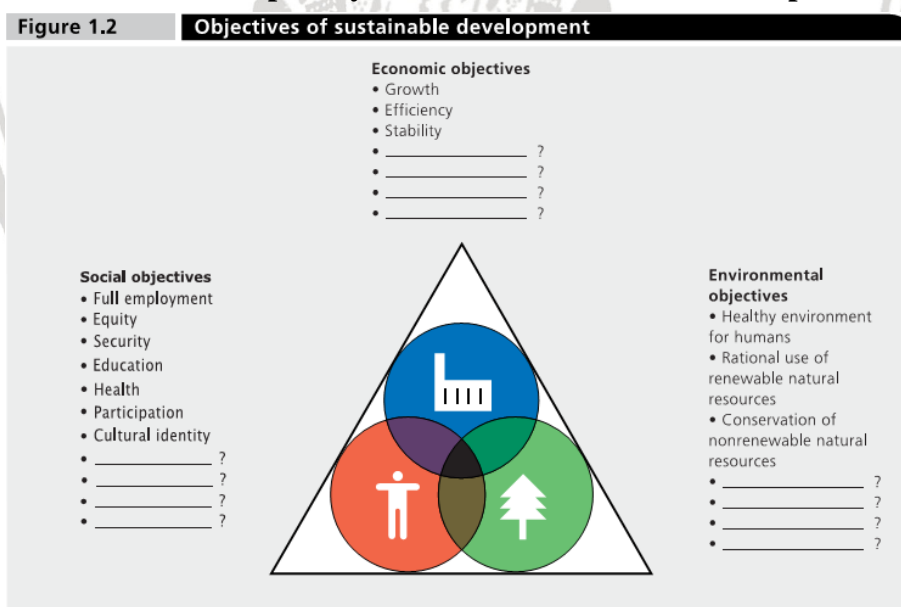
Teori Triple Bottom Line pertama kali dicetuskan oleh John Elkington yang mengajukan sebuah teori untuk mengetengahi perdebatan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dalam karyanya yang berjudul *Cannibal with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Elkington memberikan saran bagi perusahaan-perusahaan global untuk dalam kegiatan bisnisnya tetap memperhatikan aspek-aspek lain selain profit. Melihat dinamika dunia yang berubah, Elkington melihat perlunya perusahaan multinasional untuk

⁴² Tatyana P. Soubbotina. *Beyond Economic Growth: An Introduction to Sustainable Development*. Washington, D.C. The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank. Second Edition. 2004

mencari alternatif lain untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan.⁴³ Hal ini mendorong munculnya banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian mengambil langkah-langkah tanggung jawab lingkungan dan masyarakat dalam bentuk *Coorporate Social Responsibility* (CSR).⁴⁴

Bagan di bawah menjelaskan bahwa terdapat tiga variabel dalam *sustainable development* dengan berbagai macam sasaran yang harus dipenuhi. Tiga variabel tersebut adalah: 1) *Social Pillar*, 2) *Environment Pillar*, 3) *Economic Pillar*.⁴⁵ Suatu pembangunan dapat dikatakan sebuah pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* jika mampu memenuhi variabel tersebut. Masing-masing variabel memiliki indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan. Jika indikator-indikator keberhasilan tersebut dapat dipenuhi semua, maka sebuah kegiatan pembangunan dapat dikatakan berkelanjutan.

Gambar 2.1 Tipe Obyektif dalam Sustainable Development



Sumber : United Nations Publication

⁴³Elkington, John B. "Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business" 1997.

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*.

Masing-masing variabel terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menilai apakah sebuah pembangunan itu berjalan sesuai kaidah-kaidah pembangunan dunia berkelanjutan. Dalam hal ini penulis akan menjabarkan satu per satu tentang indikator-indikator dalam variabel tersebut. Pertama adalah variabel *Social Pillar*. Dalam variabel *Social Pillar* terdapat beberapa indikator, antara lain: a) *Employment*, sebuah kegiatan pembangunan dapat dikatakan sebagai *sustainable development* apabila kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian ekonomi, namun juga pemberdayaan warga local untuk dapat bekerja sebagai tenaga kerja dalam kegiatan tersebut.

Berikutnya, b) *Equity*, yaitu kesetaraan baik bagi pekerja maupun masyarakat. Dalam hal ini kesetaraan yang dimaksud adalah konsep tentang akses ekonomi maupun sosial yang harus dapat dijangkau oleh pekerja dan juga masyarakat lokal. c) *Security*, dalam menjalankan sebuah program kegiatan pembangunan, negara harus dapat menciptakan keamanan baik bagi kelangsungan program, pekerja, dan masyarakat sekitar. Ketika keamanan dapat diciptakan, maka program tersebut dapat berlangsung dengan lancar yang mana juga berdampak bagi pekerja dan masyarakat lokal. d) *Education*, pendidikan disini dimaksudkan sebagai perantara antara penyelenggara program dengan masyarakat sekitar. Sebuah program pembangunan berkelanjutan akan dapat dirasakan manfaatnya jika terjadi transfer pengetahuan antara pihak pembuat program dan masyarakat lokal di lingkungan sekitar. e) *Health*, masyarakat di beberapa daerah yang menjadi lokasi program seringkali mengalami permasalahan kesehatan.

Beberapa faktor yang menyebabkan seperti kebersihan lingkungan yang buruk, sanitasi yang kurang bersih, atau bahkan sebagai dampak dari kegiatan

pembangunan tersebut. Oleh karena itu penyelenggara program dianjurkan untuk dapat memberikan kontribusi penanganan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar.f) *Participation*, sebuah program pembangunan berkelanjutan juga memerlukan partisipasi masyarakat. Hal ini terkait dengan pemeliharaan program setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang positif juga dapat digunakan sebagai indikator bahwa kegiatan tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa adanya protes atau pertentangan. g) *Cultural Identity*, sebuah kegiatan juga dikatakan pembangunan berkelanjutan jika kegiatan tersebut juga berpartisipasi untuk mengangkat identitas kultural masyarakat setempat. Ini adalah bagian dari interaksi antara penyelenggara program dan masyarakat setempat. Selain itu, identitas kultural juga diperlukan untuk memberdayakan masyarakat lokal.

Sementara itu dalam variabel *Economic Pillar*, indikatornya meliputi: a) *growth*, pertumbuhan ekonomi yang dicapai dari adanya program. Pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya berarti bagi negara, perusahaan, atau penyelenggara program, namun juga bagi masyarakat setempat. b) *efficiency*, yaitu berkaitan dengan waktu yang ditempuh untuk dapat melaksanakan program dengan baik. Efisiensi disini lebih pada ketepatan waktu dalam mencapai tujuan. c) *Stability*, berkaitan dengan stabilitas sosial politik dalam negara tersebut. Sebuah pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan dalam kondisi sosial politik yang stabil. Sehingga potensi-potensi ancaman yang dapat mengganggu jalannya program dapat diminimalisir. Hal ini juga berkaitan dengan keamanan bagi program, pekerja, dan masyarakat lokal.

Selanjutnya, dalam variabel *Environmental*, indikatornya meliputi: a) *healthy environmental for humans*, yaitu berkaitan dengan kesehatan lingkungan bagi manusia, khususnya masyarakat sekitar. Dalam hal ini kegiatan pembangunan berkelanjutan harus menciptakan lingkungan yang sehat bagi manusia disekitarnya. Kemudian, b) *rational use renewable natural resources*, penggunaan SDA secara rasional termasuk dalam hal penghematan. Hal ini berarti, bahwa dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan itu, salah satu tujuannya adalah penggunaan sumber daya alam yang rasional atau juga dapat dikatakan penghematan. Yang terakhir, c) *conservation of non-renewable natural resources*, yaitu berkaitan konservasi SDA yang tidak dapat diperbarui seperti, minyak bumi dan gas. Konservasi sumber daya alam yang tak terbarukan menjadi salah satu fokus bagi pembangunan dunia berkelanjutan.

Jika melihat bagan di atas menyatakan bahwa yang disebut *sustainable development* adalah irisan dari ketiga variabel tersebut. Dalam prakteknya, mungkin saja tidak semua indikator tidak dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan mungkin saja satu indikator dapat tidak sesuai dengan indikator yang lain. Namun ketika suatu kegiatan pembangunan dapat memenuhi sebagian besar indikator tersebut dan memenuhi irisan dalam bagan tersebut maka sebuah kegiatan pembangunan dapat dikatakan memenuhi *sustainable development* menurut Elkington.

Teori *Triple Bottom Line* dari Elkington ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1994. Dalam argumennya Elkington menyatakan bahwa perusahaan harus merubah orientasinya, tidak hanya *profit* tapi juga *social* dan *environmental Pillar*. Walaupun pada awalnya Elkington mengajukan teori ini sebagai teori

untuk perusahaan namun dalam penerapannya, tidak hanya diterapkan oleh perusahaan tapi digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah proses pembangunan itu dapat dikatakan sebagai pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development*.⁴⁶

Sehubungan dengan judul skripsi yang ini adalah “Efektivitas Kerjasama United Nations REDD Programme tahun 2010-2013 terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” maka untuk mengukur efektivitas tersebut perlu adanya suatu ukuran untuk dapat disebut efektif. Maka dari itu penulis mengambil ukuran dari konsep *sustainable development* itu sendiri yaitu sasaran/ tujuan dari *sustainable development*, yang seringkali disebut dengan *Triple Bottom Line*. Perlu ditegaskan bahwa kata *Triple Bottom Line* yang digunakan peneliti di sini adalah tiga variabel dari *sustainable development*.

2.2.3 Operasionalisasi Konsep

Selain untuk menciptakan mekanisme baru dalam hal pendanaan usaha-usaha pengurangan emisi global dan tata kelola hutan yang lebih baik, UN REDD Programme juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan *sustainable development* di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, maka tujuan dari UN REDD Programme harus memenuhi variabel *needs* terkait dengan Tingginya tingkat deforestasi Kurangnya partisipasi masyarakat dan Limitation Keterbatasan teknologi. Adapun Variabel *needs* digunakan untuk melihat apakah pemanfaatan hutan dalam UN REDD Programme sudah memberikan akses pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat marjinal di kawasan tersebut. Sedangkan *limitations* berkaitan dengan Keterbatasan teknologi dalam *sustainable*

⁴⁶ Elkington, John. 1997. Cannibals with forks, the triple bottom line of twentieth century business, dalam Teguh Sri Pembudi. 2005. CSR. Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial. Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial (PUSENSOS), h.326

development variabel *limitation*, digunakan untuk melihat upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi keterbatasan teknologi.⁴⁷

Kemudian teori *Triple Bottom Line* yang dicetuskan oleh John Elkington digunakan untuk membedah dari sisi yang lain. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah dari sisi manfaat, UN REED Programme sudah memenuhi variabel-variabel *sustainable development*, yaitu *social Pillar* yaitu Pengendalian Deforestasi oleh REDD, dan Pelibatan masyarakat dalam program-program REDD, *environmental Pillar* mencakup dalam hal Menciptakan lingkungan yang sehat bagi umat manusia, Melakukan penghematan dalam penggunaan energi terbarukan, dan Mendorong pemerintah untuk melakukan konservasi sumber daya alam tak terbarukan dan *economic Pillar* berhubungan dengan Pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dalam program REDD, Menerapkan sistem kesetaraan antara masyarakat dan NGO, Menciptakan keamanan di lingkungan program, dan Memperhatikan pendidikan dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi program-program REDD. Dalam kasus REDD di Indonesia, pertumbuhan yang diharapkan selain berkurangnya deforestasi, juga memberikan akses ekonomi bagi masyarakat melalui skema-skema ekonomi tertentu. Dalam hal ini, yang dicanangkan oleh UN REDD adalah jangka waktu 3 tahun antara tahun 2009 hingga 2012.

⁴⁷ *Ibid*

Tabel 2.2 Tabel Operasionalisasi

Konsep & Teori	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
Sustainable Development	- <i>Needs</i>	- Tingginya tingkat deforestasi - Kurangnya partisipasi masyarakat	- Pengendalian Deforestasi oleh REDD - Pelibatan masyarakat dalam program-program REDD
	- <i>Limitation</i>	- Keterbatasan teknologi - Keterlibatan negara	- Transfer teknologi oleh REDD - Kerjasama antara pemerintah Indonesia dalam Indonesia Forest-Climate Alliance dan UNFCCC - Pembuatan regulasi pemerintah seperti Perpres No. 46/2008, Permenhut No. 2 tahun 2008, Permenhut No. 30 tahun 2009, Permenhut No. 36 tahun 2009, dan PP No. 10/2010
Triple Bottom Line	- <i>Social</i>	- <i>Employment</i> - <i>Equity</i> - <i>Security</i> - <i>Education</i>	- Pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dalam program REDD - Menerapkan sistem kesetaraan antara masyarakat dan NGO - Menciptakan keamanan di lingkungan program - Memperhatikan pendidikan dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi program-program REDD
	- <i>Economic</i>	- <i>Growth</i> - <i>Efficiency</i> - <i>Stability</i> - <i>Health</i> - <i>Participation</i> - <i>Cultural Identity</i>	- Menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan. - Melakukan program secara efisien - Mendorong pemerintah untuk menciptakan stabilitas sosio-politik - Menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat lokal - Membuka partisipasi yang luas bagi masyarakat - Berkolaborasi dengan masyarakat adat sehingga tidak menghilangkan identitas kultural
	- <i>Environment</i>	- <i>Healthy environmental for humans</i> - <i>Rational use of renewable energy</i> - <i>Conservation</i>	- Menciptakan lingkungan yang sehat bagi umat manusia - Melakukan penghematan dalam penggunaan energi terbarukan - Mendorong pemerintah untuk melakukan konservasi sumber daya alam tak terbarukan

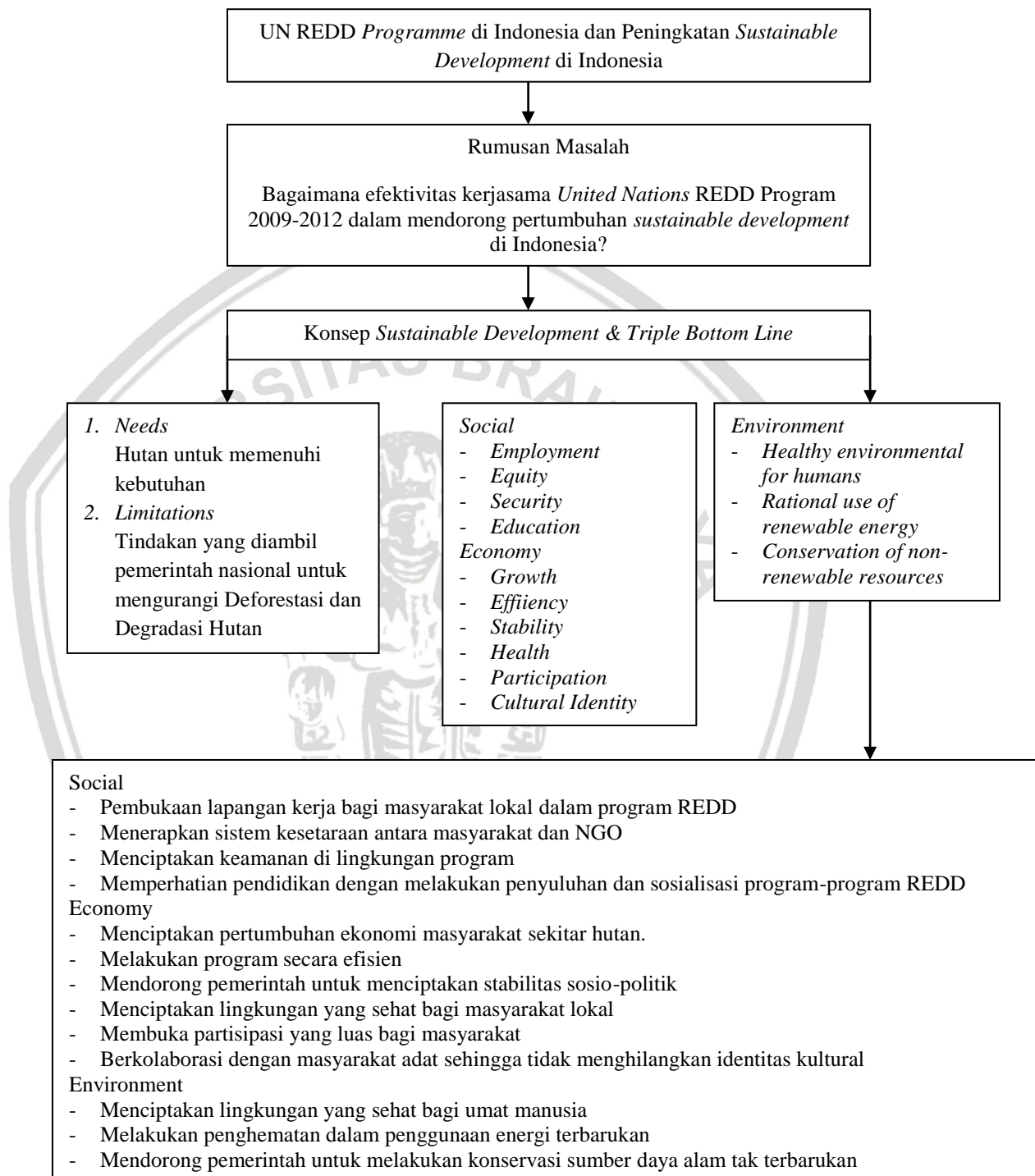
		<i>of non-renewable resources</i>	
--	--	-----------------------------------	--

Sumber : *United Nations Publication*



2.2.4 Alur Pemikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti

2.2.5 Argumen Utama

UN-REDD Programme Indonesia adalah kerja sama inisiatif antara Kementerian Kehutanan RI, Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP). Program ini bertujuan membantu dan mendukung pemerintah RI untuk secara bertahap membangun arsitektur REDD+ yang memungkinkan pelaksanaan REDD+ yang adil, setara, dan transparan, juga untuk mencapai kesiapan REDD+. UN REDD.

Programme yang telah berlangsung di Indonesia antara tahun 2009-2012 efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari serangkaian indikator pada konsep sustainable development. Selanjutnya, Teori Triple Bottom Line dan juga memiliki konsep dalam sustainable development mencakup dalam 1) bidang sosial yaitu, Pengendalian Deforestasi oleh REDD, dan Pelibatan masyarakat dalam program-program REDD 2) bidang ekonomi dengan adanya Pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dalam program REDD, Menerapkan sistem kesetaraan antara masyarakat dan NGO, Menciptakan keamanan di lingkungan program, dan Memperhatikan pendidikan dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi program-program REDD, 3) bidang Environment mencakup dalam hal Menciptakan lingkungan yang sehat bagi umat manusia, melakukan penghematan dalam penggunaan energi terbarukan, dan mendorong pemerintah untuk melakukan konservasi sumber daya alam tak terbarukan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Pada Bab ini, peneliti akan menjabarkan tentang gambaran umum REDD+ dan segala sesuatu tentang REDD+ di Indonesia sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

4.1 Gambaran Umum

Gambaran umum tentang Kerjasama antara Indonesia dan United Nations REDD Programme

4.1.1 Sejarah REDD+ di Indonesia

Terbentuknya REDD+ di Indonesia awalnya diprakarsai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdirinya REDD+ tersebut karena alasan meningkatnya angka laju deforestasi dan degradasi pada lahan gambut di Indonesia. Indonesia sendiri adalah salah satu negara berkembang yang berperan aktif dan berkomitmen dalam forum mitigasi perubahan iklim, yaitu dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia merupakan negara ketiga pemilik hutan terbesar dengan luas 130 juta ha setelah Republik Kongo dan Brazil. Hutan sendiri memiliki fungsi sangat besar bagi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat luas, karena hutan sebagai penyedia stok karbon, guna mengurangi emisi karbon. Oleh sebab itu, Indonesia berpotensi besar untuk mengurangi emisi karbon pada level global.⁴⁹

REDD+ dimulai pada tahun 1990 setelah terlaksananya Rio Earth Summit di Brazil yang mendeklarasikan keseimbangan lingkungan dan terbentuk UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1992.

⁴⁹ Retno Maryani, Putra Agung dan Suyanto, REDD+ in Indonesia: a Historical Perspective, World Agroforestry Center. 2012. Hal. 17

Indonesia meratifikasi implementasi kerangka kerja UNFCCC pada tahun 1994 dan Pada tahun 1996 dilaksanakanya regulasi manajemen lingkungan di sejumlah negara anggota UNFCCC. Menghadapi adanya ancaman lingkungan, Jepang membentuk Protokol Kyoto yang diadopsi pada tahun 1997 dan mengumpulkan anggotanya hingga di tahun 2005.⁵⁰

Selanjutnya Indonesia kembali meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2004, salah satu upaya Indonesia dalam forum ini adalah dengan meningkatkan sektor industri manufaktur yang berbasis ramah lingkungan. Tahun 2005 konferensi Protokol Kyoto dilaksanakan di Montreal Kanada, pada pertemuan iini tercetusnya ide pengurangan emisi karbon (GHG). Pengurangan emisi karbon turut Pertemuan UNFCCC ke 11 membahas mengenai deforestasi dan degradasi dan menjadi isu utama dalam agenda pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi dari negara berkembang.⁵¹

Menindak lanjuti hasil pertemuan Montreal, Indonesia berupaya untuk berkomunikasi, kordinasi dan konsultasi terkait isu REDD. The Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA), dibentuk pada bulan Juli dengan tujuan untuk mempersiapkan Konferensi COP 13 yang akan dilaksanakan di Bali 2007. IFCA menghasilkan kerangka kerja untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi. Kerangka kerja ini berdasarkan pada tindakan yang berhubungan kebijakan hutan, dan membuat rancangan dan metodologi yang berhubungan dengan sebuah penelitian. Mempelajari dari “Laporan gabungan”: Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia, hal ini direncanakan

⁵⁰ Retno Maryani, Putra Agung dan Suyanto, REDD+ in Indonesia: a Historical Perspective, World Agroforestry Center. 2012. Hal 42

⁵¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, REDD, Apakah itu?, diakses dari <http://www.redd-indonesia.org/index.php/tentang-redd/redd-apakah-itu>. pada 18 April 2018.

dalam program Kementrian kehutanan di tahun 2008. COP 13 Bali mengadopsi dua keputusan, Bali Action Plan (BAP) sebagai keputusan 1/CP13, dan pengurangan emisi dari deforestasi pada negara - negara berkembang.

Dibawah keputusan 1, konsep REDD+ di identifikasi dalam pernyataan: “Pendekatan Kebijakan dan pendorong isu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi pada negara - negara berkembang: Peran dalam Konservasi, menyeimbangkan manajemen hutan dan meningkatkan stok karbon di negara - negara berkembang. Bersama dengan keputusan 2, COP - 13 menyebarkan lima isu - isu hasil Bali Action Plan, isu - isunya yaitu: (i) pandangan - pengertian REDD, (ii) pengukuran, melaporkan dan verifikasi, (iii) hak - hak pada masyarakat adat, (iv) pilihan pendanaan, (v) aturan institusi, dimana aktivitas REDD dapat dipertimbangkan sebagai proyek kerja di tingkat nasional.

Isu mengenai pengurangan emisi karbon seperti konservasi, menyeimbangkan manajemen hutan dan menaikkan stok karbon di negara - negara berkembang, yang mana pandangan mengenai isu - isu tersebut diterapkan dalam *Land use and land use change* (LULUCF). Keuntungan biodiversity dan sosial merupakan dua kunci utama dalam menangani isu - isu tersebut. Masyarakat adat dan komunitas lokal juga sebagai aktor dan turut berpartisipasi dalam program REDD ini, khususnya dalam penetapan lahan dan distribusi dalam pendanaan. Persoalan pendanaan mengenai REDD ini mengalami perdebatan, seharusnya pendanaan dilakukan melalui Pemerintah dengan adanya dukungan kapasitas pembangunan, dari dana yang bersumber dari COP, atau dari dana pasar seperti pemberian lelang, kredit pasar karbon, dan lain - lain.

Mengacu pada peraturan Pemerintah, seharusnya REDD dibawah Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA), tetapi hal ini tidak membatasi dalam mekanisme penerimaan dana dari mekanisme pasar. Dalam monitoring, laporan dan Verifikasi (MRV) ini fokus kepada aturan yang mengacu pada tingkatan emisi, kebocoran dan ketetapan dan lainnya. Menindaklanjuti hasil COP 13 di Bali, Indonesia mengatur dan mengembangkan strategi kerangka REDD tersebut.⁵² Tahapan periode REDD ini dimulai dari 2007 - 2012. Tahapan pertama dilakukan selama periode 2007 - 2008. Pada tahapan ini REDD menjadi REDD+, yang mencakup peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Skema REDD+ berupaya unruk membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.⁵³ Bersamaan dengan tahapan ini terbentuknya pula Dewan Nasional perubahan Iklim (DNPI) oleh Presiden.

Mewujudkan komitmen penurunan emisi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN - GRK) dan perpres No.71/2011 tentang inventarisasi GRK. REDD+ merupakan salah satu bagian yang penting dalam operasionalisasi RAN - GRK dalam bidang pengelolaan hutan, lahan gambut dan pertanian. REDD+ tidak hanya sebatas pada pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau, namun akan dikembangkan pada aspek

⁵² Retno Maryani, Putra Agung dan Suyanto, REDD+ in Indonesia: a Historical Perspective, World Agroforestry Center, 2012. Hal. 26

⁵³ Satgas REDD+, REDD+ dan Satgas Kelembagaan REDD+ Sebuah Pengantar, 2012

penggunaan lahan yang sejalan sesuai kebutuhan untuk penanganan perubahan iklim.⁵⁴

Pada dasarnya, REDD+ berawal dari perdebatan mengenai kerangka implementasi konvensi perubahan iklim, terutama protocol Kyoto. Pada Protocol Kyoto hanya sekedar membahas praktek - praktek pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan seperti penghijauan dan penanaman hutan, sementara konservasi hutan dan gas rumah kaca tidak masuk didalam Protokol Kyoto. Pengurangan deforestasi dan degradasi mendapat kerangka awal dalam CoP 13 di Bali 2007, dengan menyusun Bali Action Plan (BAP), member dasar hukum pengembangan skema dan proyek percontohan REDD. Tindakan mitigasi/ internasional mencakup deforestasi dan degradasi dan menyangkut juga mengenai konservasi, sustainable forest management . Sebelumnya REDD hanya sebatas deforestasi dan degradasi, kemudian pada COP 14 di Poznan, REDD mencakup konservasi hutan menjadi REDD+. Isu utama dari REDD+ adalah benefit sharing yaitu bagaimana menciptakan skema pembagian manfaat sebagaimana yang sudah berlakukan pembayaran untuk jasa lingkungan.⁵⁵

REDD+ bagian dari kolaborasi Badan PBB yaitu UNEP, FAO dan UNDP. REDD+ dibiayai oleh bantuan internasional, Norwegia merupakan negara pendonor terbesar dalam implementasi program REDD+ di Indonesia sebesar US\$52.2 juta untuk tahun 2008 - 2009.⁵⁶ Perjalanan REDD+ dimulai tahun 2009 -

⁵⁴ BP REDD+, Mengenai REDD+, di akses dari <http://bpredd.reddplusid.org/tentang-redd/mengenai-bp-redd> , Pada 18 April 2018.

⁵⁵ Natural Resources Development Center, Konsep REDD+ dan Implementasinya, diakses dari <http://www.nature.or.id/publikasi/laporan-dan-panduan-kehutanan/modul-konsep-redd.pdf> , 2013

⁵⁶ UN - REDD Programme, Frequently Asked Questions and Answers - The UN - REDD Programme and REDD+. 2010

2015. Pada tahun 2009, Indonesia berkomitmen dalam upaya global dalam perubahan iklim Dalam jangka panjang hingga 2020, saat itu Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti agenda pertemuan internasional - 20 di Pitsburg.⁵⁷ Presiden SBY berkomitmen mengurangi emisi karbon (CO₂) hingga 26%, dibandingkan dengan scenario (Business as usual/Tanpa Rencana Aksi) pada tahun 2020. Hal ini merupakan komitmen terbesar Presiden SBY seiringan dengan program ekonomi meningkat mencapai 7%, dengan dukungan Internasional SBY berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 41%.⁵⁸

Tujuan dialog internasional perubahan iklim. Pada 26 Mei 2010 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia menandatangani surat yang memuat komitmen pendanaan hingga pendanaan US\$ 1 miliar, bertujuan upaya Indonesia mengurangi emisi, degradasi dan deforestasi.⁵⁹ Berdirinya Satuan Tugas REDD+ yang bertugas untuk memastikan berjalannya pelaksanaan REDD+ dengan baik melalui Keputusan Presiden No.19/2010. Ketua Satuan Tugas Lintas Sektor dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto. Pada Desember 2010 juga, Provinsi Kalimantan Tengah terpilih sebagai Provinsi percontohan dari program REDD+.⁶⁰

⁵⁷ Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+), Sejarah, Perjalanan REDD+ di Indonesia, diakses <http://www.reddplusid.org/index.php/sejarah> , pada 18 April 2018

⁵⁸ REDD+, REDD+ dan Satgas Kelembagaan REDD+ Sebuah Pengantar. 2012

⁵⁹ Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+), Sejarah, Perjalanan REDD+ di Indonesia, diakses <http://www.reddplusid.org/index.php/sejarah> , pada 18 April 2018

⁶⁰ REDD+, REDD+ dan Satgas Kelembagaan REDD+ Sebuah Pengantar. 2012

4.1.2 Visi dan Misi REDD+ di Indonesia

1. Visi

Menjadi program acuan untuk mengelola sumber daya hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan agar tetap menjadi asset nasional yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan masyarakat.

2. Misi

Misi dari REDD+ di Indonesia adalah untuk mewujudkan visi REDD+ untuk mengolah hutan dan melestarikan hutan untuk kehidupan masyarakat yang lebih kedepannya melalui pengelolaan yang efektif yaitu dengan memanfaatkan hutan dan lahan gambut, menyempurnakan peraturan dan meningkatkan hukum bagi kerusakan hutan serta meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan gambut.

4.1.3 Tujuan REDD+ di Indonesia

1. Tujuan Jangka Pendek (2012-2014): perbaikan kondisi tata kelola, kelembagaan, tata ruang dan iklim investasi secara strategis agar dapat mencapai komitmen Indonesia dalam penurunan emisi dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi.
2. Tujuan jangka menengah (2012-2020). Terlaksananya tata kelola sesuai kebijakan dan tata cara yang dibangun sesuai pada lembaga pengelolaan hutan dan lahan gambut serta pada ruang dan mekanisme keuangan yang telah ditetapkan dan dikembangkan dalam tahap sebelumnya agar target - target penurunan emisi 26 - 41% tahun 2020 dapat tercapai.

3. Tujuan jangka panjang (2012-2030). Hutan dan lahan Indonesia menjadi net carbon sink pada tahun 2030 sebagai hasil pelaksanaan kebijakan yang benar untuk berkelanjutan fungsi ekonomi dan jasa ekosistem dari hutan.

4.1.4 Ruang Lingkup REDD+ di Indonesia

Ruang lingkup kegiatan REDD+ di Indonesia meliputi hal-hal berikut:⁶¹

1. Penurunan emisi dari deforestasi
2. Penurunan emisi dari degradasi hutan/dan atau degradasi lahan gambut
3. Pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon melalui :
 - a. Konservasi hutan
 - b. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan (SFM)
 - c. Rehabilitasi dan restorasi kawasan yang rusak
4. Penciptaan manfaat tambahan bersama dengan peningkatan manfaat dari karbon melalui :
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal
 - b. Peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati
 - c. Peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem lain

4.1.5 Prinsip REDD+ di Indonesia

Implementasi REDD+ di Indonesia dilandaskan atas lima prinsip: efektif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel, yang dijabarkan sebagai berikut:⁶²

1. Efektif: kegiatan REDD+ menurunkan emisi dan menghasilkan manfaat tambahan yang nyata dan dapat diukur.

⁶¹ Nurtjahjawilasa, dkk. 2013. Konsep Redd+ dan Impelementasinya. Natural Resources Development Center. hal. 35.

⁶² Strategi Nasional REDD+, Strategi Nasional REDD+ Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia, Juni 2012, hal. 7

2. Efisien: kegiatan REDD+ di Indonesia adalah kegiatan jangka panjang yang mendatangkan keuntungan finansial, ekologis dan sosial secara optimal.
3. Adil: Pelaksanaan REDD+ dilakukan dengan prinsip kesetaraan bagi semua orang dan perlindungan hak asasi manusia dalam pengelolaan hutan termasuk untuk kelompok perempuan dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan sosial - ekonomi dan lingkungan..
4. Transparan: Transparansi dalam kegiatan REDD+ memberikan pemahaman yang utuh dan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk terlibat.
5. Akuntabel: Pelaksanaan REDD+ dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional dari sisi relevansi, proses, pendanaan, maupun hasil yang diperoleh.

4.1.6 Strategi REDD+ di Indonesia

1. Strategi Umum

Lembaga REDD+ memiliki strategi dalam pelaksanaan program - program yang berjalan. Pada pelaksanaan REDD+ memiliki dua strategi yaitu: Strategi Umum dan Strategi Yuridiksi (Khusus). Berikut ini adalah strategi umum REDD+ ⁶³

- a. Integrasi kebijakan dan program REDD+ pada segala tingkatan pemerintahan: pusat, provinsi, kabupaten hingga desa .
- b. Tujuan ditentukan pada tingkat nasional, dengan pelaksanaan pada tingkat sub - nasional .

⁶³ Satgas REDD+. Strategi Nasional REDD+ (Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia. September. 2012.

- c. Pada tingkat sub - nasional, pengembangan kelembagaan padajurisdiksi provinsi dan inovasi program pada jurisdiksi kabupaten hingga desa .
- d. Dimulai dengan menawarkan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten (MOU dan PKS) .
- e. Mendorong komitmen pemerintah pada berbagai tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten) secara bersama untuk menjalankan inisiatif REDD+ .
- f. Program pada sub - nasional dimulai dengan penyiapaninstitusi, ke program - program strategis dan secara bertahapbergerak ke program pembayaran berbasis kinerja .

Strategi umum ini berupaya untuk mengarahkan program REDD+ dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat. Dilaksanakan secara bertahap, Program REDD+ dimulai dari Provinsi Percontohan yaitu Kalimantan Tengah kemudian disusul oleh Provinsi - provinsi yang masih memiliki lahan/kawasan hutan yang cakupanya masih luas.Selain itu, program REDD+ dilakukan secara bertingkat, karena dimulai dari kebijakan nasional yang berada di tingkat pusat yang ditransfer kepada Provinsi, kabupaten hingga ke desa - desa.

2. Strategi Khusus

Strategi khusus (Jurisdiksi) merupakan strategi kegiatan REDD+ yang berupaya untuk meluaskan program REDD+ di 21 Provinsi. Sebelumnya pelaksanaan REDD+ telah dilakukan di beberapa Provinsi. Pada gambar di atas warna light grey seperti: Aceh, Riau, Sumatera Barat,

Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Papua bagian dari Provinsi yang termasuk dalam pelaksanaan Program REDD+, sedangkan pada nama Provinsi - Provinsi yang tertera pada gambar diatas merupakan provinsi lain yang akan di masukkan dalam kerangka persiapan REDD+.

4.1.7 Pendekatan REDD+ di Indonesia

Pendekatan REDD+ Kompleksitas proses-proses ilmiah yang terjadi dalam hutan menjadikan persoalan rinci mengenai peran hutan dalam perubahan iklim banyak menimbulkan perdebatan di kalangan para pakar, bagaimana memasukkan peran hutan dalam kesepakatan negosiasi isu perubahan iklim khususnya dalam skema REDD+. Ini terlihat dari perkembangan sejak masuknya kegiatan Aforestasi (Afforestation) dan Reforestasi (Reforestation) dalam Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism /CDM*) pada COP ke 3 tahun 1997 di Tokyo, Jepang dan kemudian dalam pertemuan COP ke 11 di Montreal, Kanada tahun 2005 dengan konsep Red (satu D), yang berkembang menjadi Redd (dua D) di COP 13 di Bali, Indonesia, dan akhirnya Redd+ (dengan Plus, masuknya SFM, konservasi, dan peningkatan simpanan karbon) yang baru diterima dan disahkan pada pertemuan COP ke 16 di Cancun, Meksiko.⁶⁴

Tidak hanya sampai di situ, bahkan pada pertemuan COP 18 tahun 2012 di Doha, Qatar masalah metodologi terkait Measurement, Reporting, and Verification (MRV), dan Safeguard untuk Redd+ masih menjadi isu yang belum

⁶⁴ Kusdamayanti, dkk. Natural Resource Development Center. Modul Konsep REDD+ dan Implementasinya. Pemerintah Australia Melalui Program Responsible Asia Forestry & Trade. 2013

disepakati sehingga persoalan komitmen pendanaan Redd+ ikut terpengaruh dan kemudian menjadi topik yang terus berkembang tanpa kesepakatan. Namun demikian konsep dasar Redd+ sebenarnya telah disepakati sebagaimana hasil pertemuan di Bali tahun 2007.

Dinamika perubahan stok karbon dari suatu kawasan inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam skema REDD+. Sepanjang waktu pengelolaan berbagai jenis kawasan tersebut terjadi dinamika penurunan stok karbon karena ada emisi karbon dan atau terjadi peningkatan stok karbon melalui penyerapan (sequestration / removal) karbon. Di dalam skema Redd+ masing-masing tipologi hutan dan kawasan itu minimal harus dipertahankan stok karbon dasarnya (baseline). Bagi kawasan yang masih diatas batas definisi hutan stok karbonnya harus dijaga atau ditingkatkan. Sedangkan kawasan yang stok karbonnya dibawah batas definisi hutan harus meningkatkannya melalui berbagai upaya antara lain penanaman hutan sehingga selama jangka waktu tertentu akan terjadi penambahan (selisih dengan delta positif) dari proses mengemisi dan penyerapan karbon di kawasan itu.⁶⁵

1. Pendekatan sub-nasional

Pendekatan sub-nasional mengusulkan kegiatan REDD+ diterapkan di areal dengan batas geografis tertentu, atau sebagai proyek oleh individu, masyarakat, lembaga non-pemerintah, perusahaan swasta atau pemerintah daerah dan nasional. Dalam ketiga pendekatan tersebut pemberian kredit untuk kegiatan REDD+ memerlukan kesepakatan aturan-aturan dalam pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV), sistem pemberian kredit,

⁶⁵ Kusdamayanti, dkk. Natural Resource Development Center. Modul Konsep REDD+ dan Implementasinya. Pemerintah Australia Melalui Program Responsible Asia Forestry & Trade. 2013

serta kelembagaan di tingkat nasional (misalnya pemegang wewenang yang ditunjuk atau badan/lembaga serupa yang dapat menyetujui semua proyek) dan tingkat internasional (misalnya badan penasihat dan pusat pendaftaran proyek dan kredit Redd+).

2. Pendekatan nasional

usulan kebanyakan negara kepada NFCCC condong kearah pendekatan nasional. hal ini mencerminkan pengalaman dalam menghadapi kebocoran dan biaya transaksi, yang menjadi risiko dari pendekatan sub-nasional. Pendekatan nasional juga menyoroti isu kedaulatan karena mengakui bahwa memerangi deforestasi berkaitan dengan perubahan kebijakan yang luas. Pendekatan ini lebih berpotensi mengurangi emisi dalam skala luas dan berjangka panjang dibandingkan dengan menggunakan pendekatan sub-nasional atau bertingkat.

3. Pendekatan bertingkat

Mengingat keadaan nasional yang beragam, sejumlah usulan yang diajukan ke UNFCCC menyarankan untuk memadukan kegiatan sub-nasional ke dalam kerangka kerja penghitungan nasional melalui pendekatan ‘bertingkat’ (dipaparkan secara jelas oleh Pedroni dkk. 2007). Dengan menggunakan pendekatan ini satu negara dapat memulai kegiatan Redd+ pada skala manapun.⁶⁶

4.1.8 Proses Kebijakan Tentang Redd Di Indonesia

Proses penentuan kebijakan yang terkait dengan Redd di Indonesia didominasi oleh pendekatan dari-atas-ke-bawah (top-down). hal ini dapat

⁶⁶ Ibid, hal 18

dimengerti mengingat sebagian besar delegasi dalam Konferensi Para Pihak adalah pegawai pemerintah (pusat). Merekalah yang memperoleh informasi pertama dan mereka pulalah yang diberi wewenang oleh Konvensi Perubahan Iklim dalam menentukan posisi di meja perundingan dan pelaksanaan kegiatan Redd di kemudian hari. Diawali dengan pembentukan Indonesian Forest-Climate Alliance (IFCA), pemerintah mengundang partisipasi berbagai pihak untuk mencermati rancang bangun Redd. Kelompok ini kemudian merumuskan perlunya kerangka kebijakan yang terkait dengan: (i) penentuan tingkat emisi acuan, (ii) strategi penggunaan lahan, (iii) pemantauan, (iv) mekanisme keuangan dan (v) pembagian keuntungan dan tanggung jawab.

Untuk mematangkan proses kebijakan yang akan ditempuh, Pemerintah selanjutnya mengusulkan rancangan kesiapan (Readiness Plan, R-Plan) kepada Bank Dunia untuk menunjang pelaksanaan Redd di Indonesia. Selain kelima komponen di atas, di dalam R-Plan juga diuraikan rencana penilaian dampak Redd terhadap kondisi sosial dan lingkungan serta investasi untuk pengembangan kapasitas. Bersamaan dengan ini, usulan lain juga diajukan kepada uN-R eDD, sebuah program kolaborasi badan-badan PBB (FAo, uNeP, dan uNDP), khususnya yang menyangkut kerjasama lintas sektor di Indonesia.

Sementara itu kalangan masyarakat madani (civil society) dan pemangku kepentingan (stakeholders) di luar pemerintah lebih banyak bersikap menunggu atau memberi respon terhadap ajakan pihak ketiga, termasuk dari masyarakat madani dan investor dari luar negeri. Berbagai kegiatan uji coba (demonstration activities) sudah dilakukan di beberapa daerah. Konsultasi publik juga telah dilakukan dengan dukungan yang terbatas dari Pemerintah Daerah yang belum

sepenuhnya memahami proses Redd. oleh karena itu dalam fase persiapan ini pemerintah akan banyak berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk dapat memposisikan mereka dalam kebijakan Redd secara utuh baik pada tingkat nasional maupun sub-nasional (tingkat daerah).⁶⁷

4.1.9 Pelaksanaan Kerjasama antara Indonesia dan United Nations REDD Programme

UN-REDD Programme Indonesia telah diluncurkan secara resmi pada akhir bulan Maret 2010. Momen itu menandai titik dimulainya UN-REDD Programme Indonesia dalam mengimplementasikan aktivitas-aktivitasnya secara penuh. Sejak acara peluncuran itu, UN-REDD Programme Indonesia telah melaksanakan banyak aktivitas. Bersama ini, dengan senang hati saya menyampaikan ringkasan aktivitas yang telah dilaksanakan selama tahun 2010 dan awal tahun 2011, juga memberikan informasi ringkas berkaitan dengan UN-REDD Programme Indonesia.⁶⁸

Melalui berbagai aktivitas yang diselenggarakan secara intensif selama tahun 2010, UNREDD Programme Indonesia telah berupaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya-upaya REDD+ di Indonesia. UN-REDD Programme Indonesia telah membantu pencapaian beberapa tujuan nasional dan mendukung berbagai proses nasional seperti penyusunan draf Strategi Nasional REDD+ (Stranas REDD+). UNREDD Programme Indonesia juga membantu penyusunan konsep Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent atau

⁶⁷ Nurtjahjawilasa, dkk. 2013. Konsep Redd+ dan Impelementasinya. Natural Resources Development Center. 2013

⁶⁸ Strategi Nasional REDD+, Strategi Nasional REDD+ Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia, Juni 2012

FPIC), dengan mendukung inisiatif konsensus nasional di antara masyarakat adat dan komunitas lokal, untuk membahas pentingnya implementasi FPIC demi kesuksesan REDD+ dalam waktu dekat.

Pemerintah Republik Indonesia (RI), bekerja sama dengan badan-badan yang ada di bawah lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yaitu Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP), mengembangkan suatu program kerja sama untuk menindaklanjuti rekomendasi COP13 yang disebut dengan UN-REDD National Joint Programme. Program ini bertujuan mendukung Indonesia mencapai kesiapan REDD+ sebelum akhir tahun 2012. Program kerja sama UN-REDD tersebut ditandatangani oleh Kementerian Kehutanan RI dan ketiga badan PBB yang telah disebutkan di atas pada tanggal 23 November 2009 di Jakarta. Acara peluncuran pelaksanaan program ini dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2010, yang menandai langkah awal pelaksanaan program UNREDD di Indonesia secara penuh. Ada tiga hasil yang hendak dicapai UN-REDD Programme Indonesia:

1. Kuatnya partisipasi dan konsensus berbagai pihak di level nasional dan provinsi.
2. Berhasilnya percontohan penyusunan REL, MRV dan sistem pembayaran yang adil berdasarkan arsitektur REDD nasional
3. Terbangunnya kapasitas untuk melaksanakan REDD+ di tingkat kabupaten

Untuk mewujudkan ketiga hasil tersebut, UN-REDD Programme Indonesia telah bekerja sama dengan mitra-mitra dari beberapa lembaga seperti Satgas Nasional REDD+, Bappenas, DNPI, dan DKN.

4.1.10 Pelaksanaan UN-REDD Programm dan ReDD+ di Indonesia

REDD+ adalah salah satu tindak lanjut mandat keputusan COP13. Menurut Keputusan 2 COP13, negara-negara maju dan berkembang dianjurkan bekerja sama dalam upaya-upaya menurunkan tingkat emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, termasuk dukungan finansial, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Sebagai tambahan, Aktivitas Percontohan (Demonstration Activity atau DA) REDD+ dapat menjadi fasilitas pembelajaran dan sarana untuk membangun komitmen dan sinergi di antara para pemangku kepentingan multipihak. Dengan demikian, pengembangan DA REDD+ merupakan komponen penting dalam Strategi Kesiapan REDD+ di Indonesia. Karenanya, berbagai kegiatan terkait metodologi, kebijakan, dan keterlibatan para pemangku kepentingan diterapkan.⁶⁹

Untuk Hasil 1 yang ditetapkan, UN-REDD Programme Indonesia telah mendukung aktivitas-aktivitas terkait REDD+ dalam meningkatkan konsensus dan partisipasi multipihak di tingkat nasional. Karena UN-REDD Programme Indonesia juga harus mengembangkan kriteria untuk proyek percontohnya, program tersebut memfasilitasi rapat-rapat konsultasi untuk menentukan kriteria seleksi Provinsi Percontohan REDD+ seperti yang

⁶⁹ Retno Maryani, Putra Agung dan Suyanto, 2012, REDD+ in Indonesia: a Historical Perspective, World Agroforestry Center, hal: 1

disyaratkan dalam LoI. Pada saat ini, Satgas Nasional REDD+ bertanggung jawab menyelesaikan susunan kriteria tersebut

Provinsi percontohan dibutuhkan sebagai lokasi percontohan untuk mencapai kesiapan implementasi REDD+ nasional. Setelah Lokakarya peluncuran UNREDD Programme Indonesia, pemilihan provinsi percontohan untuk UNREDD Programme Indonesia telah selesai dilakukan. Berdasarkan Kriteria Seleksi DA yang dikembangkan oleh UN-REDD Programme Indonesia dan masukan dari pemangku kepentingan multipihak, akhirnya Sulawesi Tengah terpilih menjadi Provinsi Percontohan Utama Program UN-REDD di Indonesia. Terpilihnya Sulawesi Tengah sebagai Provinsi Percontohan didasarkan pada fakta-fakta bahwa masih ada deforestasi namun tutupan lahan masih baik; kepadatan karbon yang relatif tinggi; dukungan politik daerah yang kuat; kapasitas daerah yang cukup kuat untuk mendorong tercapainya hasil yang cepat; penyebab deforestasi dapat dikenali dengan mudah; REDD+ di wilayah itu dapat menghasilkan berbagai manfaat yang signifikan; preferensi pemerintah; serta belum adanya inisiatif REDD+ lainnya di wilayah itu. Sulawesi Tengah diresmikan secara formal sebagai DA UN-REDD Programme Indonesia melalui acara peluncuran UN-REDD Programme Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2010. Lebih dari 200 orang hadir di acara itu, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah, perwakilan-perwakilan dari FAO, UNDP, UNODC, LSM, organisasi masyarakat sipil, universitas partner, dan sektor swasta.

Tak lama setelah peluncurannya secara resmi, beberapa hasil telah dicapai oleh UN-REDD Programme Indonesia dan mitra-mitranya di

Sulawesi Tengah. Setelah beberapa konsultasi multipihak yang bertujuan membangun pemahaman yang sama dan mempromosikan koordinasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan di Provinsi itu, Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ tingkat provinsi telah dibentuk secara resmi, ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tengah no. 522/84/ Dishutda – G.ST/2011, tanggal 18 Februari 2011. SK itu diumumkan secara resmi kepada publik pada tanggal 14 Maret 2011 pada acara Pengukuhan Pokja REDD+ Sulawesi Tengah tahun 2011, sekaligus diumumkan namanama anggota Kelompok Kerja tersebut.⁷⁰

Pokja REDD+ mewakili semua pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah, yaitu Pemerintah Provinsi, kalangan universitas, komunitas lokal/masyarakat adat, LSM yang mempromosikan kesetaraan gender, dan LSM lainnya. Untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas mereka, Pokja tersebut memiliki sekretariat di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu.⁷¹

Selain penetapan Sulawesi Tengah sebagai Provinsi Percontohan, telah diputuskan bahwa untuk pendekatan keseluruhan pulau, beberapa provinsi juga akan menjadi fokus kegiatan UN-REDD Programme Indonesia yang berikutnya. Selama semester kedua tahun 2010, beberapa misi kunjungan telah dilakukan di Sulawesi Tengah. Pertemuan-pertemuan telah diadakan

⁷⁰ United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID), Instrumen Pendanaan REDD+ di Indonesia Membangun Dasar Pemikiran untuk Inovasi Pembiayaan, hal: 4 & 8

⁷¹ Beberapa sasaran politik luar negeri Indonesia yang menjadi fokus utama pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono adalah, 1) meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional, 2) mengikutsertakan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, 3) pemulihan citra Indonesia, 4) meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional, 5) mendorong terciptanya tatanan dan kerja sama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional. Lebih lanjut baca Ganewati Wuryandari, Op. Cit., hal. 204.

dengan berbagai LSM, perkumpulan masyarakat sipil dan universitas lokal (terutama Universitas Tadulako, Palu), serta pemerintah lokal.

Perjalanan REDD+ dibagi dalam tiga Fase :⁷²

1. Fase pertama (2010-2013). Fase pertama ini merupakan tahap Persiapan dalam menjalankan program REDD+, dimulai dengan menyusun rencana program yang akan dilaksanakan, dan pembentukan lembaga Satuan Tugas (Satgas) REDD+. Tahap ini bertujuan untuk menyiapkan perangkat metodologi dan strategi implementasi REDDI, termasuk penentuan kriteria untuk pemilihan lokasi pelaksanaan (pilot/ demonstration activities, selanjutnya disingkat DA). Tahapan tersebut dilakukan dengan melakukan komunikasi/koordinasi/konsultasi dengan para pihak. Pada fase ini terdapat beberapa program sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Rencana Aksi Nasional (Strategi Nasional REDD di Indonesia)
 - b. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) REDD untuk mengkoordinasikan usaha-usaha pengembangan dan implementasi REDD
 - c. Merancang dan menetapkan instrumen pengelolaan dana hibah
 - d. Menetapkan Propinsi Percontohan
2. Fase kedua (2014-2016). Fase kedua ini merupakan tahap transformasi. Tahap transformasi ini dapat dikatakan sebagai tahap pelaksanaan REDD+. Indonesia siap berkomitmen dari segi institusional dan

⁷² BP REDD+, Skema pelaksanaan REDD+ di Indonesia, diakses dari <http://182.253.224.169/tentang-redd/skema-pelaksanaan-redd-di-indonesia>, diakses pada 18 April 2018

operasional untuk mengurangi verifikasi pengurangan emisi. Pada fase ini terdapat beberapa program sebagai berikut:

- a. Mekanisme MRV (Measurement, Reporting and Verification)
 - b. Penerbitan Moratorium
 - c. Membangun Database Hutan Rusak Untuk Pembangunan Ekonomi dan Investasi
 - d. Penegakkan Hukum Pemberantasan Illegal Logging
 - e. Penyelesaian Konflik Lahan
3. Fase ketiga (2017-2020). Fase ketiga ini merupakan fase Kontribusi pada pengurangan emisi yang terverifikasi. Pada fase ketiga ini diharapkan terwujudnya mekanisme nasional dalam kontribusi terhadap penurunan tingkat emisi. Adapun program yang ada pada fase ini adalah Implementasi dari mekanisme pengurangan emisi berdasarkan kontribusi yang diverifikasi.

4.1.11 Strategi Nasional REDD+

Untuk mensukseskan strategi REDD+, partisipasi pemangku kepentingan secara luas menjadi hal yang mendasar, dan sebisa mungkin dilakukan di awal penyusunan dan di proses perencanaan. UN-REDD Programme Indonesia menyadari hal itu. Salah satu peran penting UN-REDD Programme Indonesia terkait dengan strategi REDD+ adalah mendukung Bappenas dan proyek Legal Empowerment and Assistance to the Disadvantaged (LEAD) UNDP. Salah satu hasil utama yang dicapai di tahun 2010 adalah tersusunnya draf Stranas REDD+. UN-REDD Programme Indonesia memfasilitasi proses konsultasi yang intensif, menyeluruh, dan

melibatkan pemangku kepentingan multipihak dalam proses penyusunan draf Stranas REDD+. Metodologi yang digunakan pada proses konsultasi ini diilhami oleh proyek LEAD UNDP, dan rancangan yang ditargetkannya merupakan kolaborasi berbagai unit di UNDP. Dimulai pada Juli 2010 dan berlangsung selama beberapa bulan, proses penyusunan itu telah melibatkan banyak diskusi kelompok terfokus (focus group discussions atau FGD) dan konsultasi-konsultasi di tingkat nasional, juga persiapan dan pelaksanaan serangkaian Rapat Konsultasi Regional. Lebih dari 300 ahli yang mewakili lebih dari 200 organisasi lokal, nasional, maupun internasional berpartisipasi di tujuh Konsultasi Publik Regional dan satu Konsultasi Publik Nasional. Selama proses tersebut, UN-REDD Programme Indonesia mengembangkan pendekatan kemitraan dengan Bappenas maupun kementerian-kementerian terkait, pemerintah sub-nasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat sipil, kalangan akademisi, dan pelaku swasta. Dengan membuka akses atas proses tersebut, UN-REDD Programme Indonesia telah meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan para pemangku kepentingan, serta memperbaiki kualitas draf Stranas itu sendiri.

Dengan dukungan dan fasilitasi dari UN-REDD Programme Indonesia, proses penyusunan Stranas menghasilkan tiga Draf Publik, satu Ringkasan Eksekutif Strategi Nasional REDD+, dan satu Laporan Hikmah Pembelajaran yang dipetik dari proses konsultasi pemangku kepentingan multipihak.

Pada tanggal 18 November 2010, Bappenas secara resmi menyerahkan Draf Final Strategi Nasional REDD+ kepada Satgas REDD+. Di tahun 2011,

UN-REDD Programme Indonesia terus terlibat dalam proses multipihak untuk menyelesaikan Strategi REDD+.

4.1.12 Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan negara lain dalam pelaksanaan UN-ReDD Programme

Cukup banyak kemajuan yang terkait dengan peran REDD+ dalam mengejar target akhir UNFCCC untuk mengatasi kenaikan suhu global di atas suhu periode pra industri. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari hasil Kesepakatan Copenhagen dan Keputusan 4/CP.15 tentang metodologi REDD+, hasil Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Aksi Kerja Sama Jangka Panjang REDD+ (the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action atau AWGLCA), juga Keputusan 1/CP.13. Lebih jauh lagi yakni pada pertemuan tingkat kementerian di Paris bulan Maret 2010, diperoleh momentum politik ketika sekitar lima puluh negara meminta agar Kemitraan REDD+ diresmikan pada Konferensi Perubahan Iklim dan Hutan di Oslo 2010 (Oslo Climate Change and Forest Conference 2010).

1. Kerjasama antara pemerintah Indonesia – Norwegia

Indonesia dan Norwegia sama-sama menyadari bahwa perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia pada saat ini. Terkait dengan ini, Indonesia telah menyatakan komitmen dengan menetapkan target penurunan emisi yang ambisius dan Norwegia ingin membantu upaya Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmen tersebut. Untuk itu, Norwegia dan Indonesia telah menyepakati untuk bermitra dalam mendukung upaya Indonesia menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan serta lahan gambut. Wujud dukungan

Norwegia ini adalah dengan menyediakan pendanaan sampai dengan USD1 miliar yang akan dibayarkan berdasarkan capaian kinerja Indonesia selama periode 7-8 tahun mendatang.⁷³

Kesepakatan USD1 miliar itu sangat mempengaruhi perdebatan tentang kesiapan REDD+ Indonesia, dan memberikan laju kecepatan serta intensitas proses persiapan REDD+ yang baru. Hasilnya, Pemerintah RI merasakan perlunya membangun kapasitas para pemangku kepentingan di pemerintahan pusat terkait dengan isu perubahan iklim dan REDD+. Dalam konteks ini, UN-REDD Programme Indonesia yang telah diluncurkan sebelumnya, mengambil inisiatif mendukung kegiatan pelatihan-pelatihan tentang perubahan iklim dan REDD+ bagi lembaga-lembaga penting di tingkat nasional seperti Dewan Nasional Perubahan Iklim. UN-REDD Programme Indonesia juga memberikan dukungan praktis kepada lembaga-lembaga yang ada di berbagai pemerintahan, dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang terkait REDD+, termasuk Satgas Nasional REDD+ yang dipimpin oleh Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dukungan terhadap lembaga-lembaga terkait seperti UKP4 dalam persiapan mereka menuju arsitektur REDD+ nasional merupakan sinergi yang tepat dengan program UN-REDD. Hal itu membawa UN-REDD Programme Indonesia menuju capaian kunci di bawah Hasil no. 1 program nasional UN-REDD, yaitu 'kuatnya partisipasi dan konsensus multipihak di level nasional dan provinsi'.⁷⁴

⁷³ UN REDD Programme Indonesia, Tahun Pertama UN-REDD Programme Indonesia: Mempercepat Kesiapan REDD+ Nasional, diakses dari <http://www.redd-indonesia.org/pdf/AnnRepUN-REDDFinalindo.pdf> pada 18 april 2018

⁷⁴ Ibid

2. Kerjasama Pemerintah Indonesia-Australia di Kalimantan Tengah

Kerjasama ini merupakan bagian dari Kalimantan Forest Carbon Partnership (KFCP), yang secara keseluruhan di bawah payung Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP).⁷⁵

KFCP adalah DA-REDD pertama di Indonesia dan DA-REDD di lahan gambut pertama di dunia, dengan target penurunan emisi gas rumah kaca dari hutan rawa gambut seluas 130.000 ha dan lahan gambut rusak lainnya, melalui perbaikan praktek pengelolaan hutan, pencegahan kebakaran dan rehabilitasi sistem hidrologi lahan gambut. KFCP juga ditujukan untuk uji coba metodologi pengukuran gas rumah kaca di lahan gambut dikaitkan dengan pengembangan sistem MRV di tingkat nasional, uji coba penerapan mekanisme. Pembelajaran dari KFCP diharapkan dapat memberikan kontribusi pada proses penyebaran informasi tentang inisiatif REDD dan proses negosiasi di bawah UNFCCC.

3. Kerjasama Pemerintah Indonesia-Jerman di Kalimantan Timur

Kerjasama DA-REDD ini merupakan bagian dari Forests and Climate Change Programme (FORCLIME), yang terbagi ke dalam dua fase yaitu mendukung kegiatan Readiness dan investasi dalam implementasi DA di tingkat kabupaten.⁷⁶

4. Kerjasama Indonesia-ITTO

Kerjasama Indonesia dengan International Tropical Timber Organization (ITTO) di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur, yang akan

⁷⁵ Strategi REDD-Indonesia Fase Readiness 2009-2012 dan Progress Implementasinya. http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/strategi_REDDI_0.pdf diakses pada 18 april 2018

⁷⁶ Ibid

berlangsung tahun 2009 – 2012, merupakan kerjasama konservasi hutan tropis untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta peningkatan stok karbon.⁷⁷

Tujuan dari project ini adalah untuk melakukan pengurangan emisi dan mempertahankan stok carbon yang ada serta meningkatkan kapasitas serapan carbon, juga untuk menciptakan kondisi pemungkin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di dalam dan sekitar Taman Nasional Meru Betiri melalui pelibatan masyarakat dan instansi terkait dalam kegiatan project.



⁷⁷ Ibid

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan membahas tentang kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian. Kerangka konseptual yang dimaksud ini meliputi program yang termasuk dalam *Sustainable Development* dan *Triple Bottom Line*. Adapun pembahasan mengenai program dalam *Sustainable Development* dan *Triple Bottom Line* yang telah didapatkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

5.1 Sustainable Development

5.1.1 Needs

Kegiatan Sosial Kerjasama United Nations REDD Program dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Deforestasi oleh REDD

Sekitar 8 juta sampai 16 juta hektar hutan tropis dirusak setiap tahunnya antara tahun 1980an dan 1990an, perusakan ini melepaskan 0.8 milyar sampai 2.4 milyar ton karbon ke atmosfer. 20% pemanasan global disebabkan oleh deforestasi, hampir sama besarnya dengan emisi yang dihasilkan oleh Amerika Serikat penghasil emisi terbesar di dunia. Terdapat banyak penyebab deforestasi, dan hal-hal tersebut sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Penyebab utama deforestasi meliputi padang rumput untuk peternakan, pertanian industri (kedelai, kelapa sawit), dan pembalakan kayukayu tropis untuk keperluan ekspor, yang banyak dilakukan. Emisi gas rumah kaca global yang berasal dari bahan bakar fosil negara-negara maju dan berkembang dan deforestasi

hutan tropis harus mulai diturunkan pada dekade mendatang apabila kita mengharapkan tingkat pemanasan tetap di bawah 2°C pada tahun 2050.⁷⁸

Tujuan utama dari program ini adalah untuk melakukan penyelenggaraan dari Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan yang memiliki misi untuk mendapatkan sebuah desain pengelolaan hutan yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan. Karena itulah, kegiatan ini dapat dilaksanakan pada hutan negara dan/atau hutan hak di seluruh Indonesia. Upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (reducing emissions from deforestation and forest degradation atau REDD+) ini mendapatkan respon luar biasa dari berbagai pihak.

Usulan-usulan untuk pencegahan deforestasi terbagi terbagi menjadi dua kelompok utama.⁷⁹

- a. Pendekatan berbasis pasar - mengaitkan skema-skema pengurangan deforestasi dengan sistem perdagangan karbon. Koalisi negara-negara yang memiliki hutan hujan (*the Coalition for Rainforest Nations*), sebagian besar LSM konservasi dan kalangan bisnis pendanaan karbon mendorong skema-skema dimana negara-negara yang memiliki hutan mendapat kredit penurunan emisi karbon bila tidak menebangi hutan mereka. Hal ini menimbulkan masalah etika

⁷⁸ http://www.climatenetwork.org/sites/default/files/Bahasa_Indonesia_laid-out_version_-_CAN_REDD_Discussion_Paper.pdf . Diakses pada 15 Mei 2018

⁷⁹ <http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/perubahan-iklim-pencegahan-deforestasi-dan-indonesia> . Diakses pada 15 Mei 1994

sebab negara dan perusahaan dapat membeli hak untuk tetap mencemari atmosfer bumi.

- b. Pendekatan dana publik - memakai dana bantuan dari negara-negara kaya untuk membayar negara-negara kaya hutan di Selatan untuk mengurangi pembukaan hutan. Bantuan tersebut dikumpulkan melalui sumbangan sukarela dari negara-negara industri atau lewat pajak. Indonesia dan Brazil suka dengan pilihan ini. Apakah pembayaran dilakukan setiap tahun atau dengan jangka waktu tertentu dan apakah pembayaran dilakukan dimuka atau setelah ada tindakan juga masih dalam negosiasi.

2. **Pelibatan Masyarakat dalam Program-Program REDD**

Bentuk pelibatan masyarakat dapat dilakukan setidaknya dalam dua hal. Pertama, mendorong partisipasi masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Bentuk-bentuk partisipasi dilakukan dengan melakukan penguatan visi masyarakat yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam, menginventarisasi kearifan lokal dan potensi penggunaan lahan mereka dalam perencanaan tata guna lahan saat ini dan untuk masa yang akan datang. Potensi dan pola penggunaan lahan ini kemudian dituangkan dalam perencanaan sumber daya alam yang terintegrasi dengan perencanaan kampung yang ada sebelumnya. Komitmen ini selanjutnya diterjemahkan dalam kesepakatan untuk melakukan mitigasi perubahan iklim di kampung masing-masing.

Kedua, memastikan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan strategis dalam program REDD+.

Masyarakat atau perwakilan masyarakat perlu dilibatkan dalam proses-proses diskusi dan pengambilan keputusan penting yang dilakukan oleh berbagai kelompok kerja atau lembaga REDD+ yang dibentuk di berbagai tingkat. Aspirasi atau suara mereka dapat juga dikumpulkan melalui wadah, forum, atau lingkaran belajar masyarakat dimana kelompok-kelompok masyarakat lintas bentang alam dapat berkumpul dan mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi dan harapan mereka terhadap pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Wadah atau lingkaran belajar masyarakat ini akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan atau menyalurkan aspirasi kepada pengambil keputusan.

Adapun temuan-temuan kunci terkait pelibatan masyarakat dalam implementasi REDD+ di wilayah Asia Tenggara adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Keberhasilan implementasi REDD+ memerlukan perubahan mindset terkait tata kelola dan pemanfaatan SDH termasuk komitmen dari para pengambil kebijakan. Hal ini memerlukan suatu visi baru dan pendekatan tata kelola yang memberikan penekanan terkait salah satunya sumbangsih hutan untuk konservasi lingkungan.
2. Pengakuan hak-hak komunitas lokal (land tenure/ kebijakan pemberian akses) untuk pemanfaatan SDH secara lestari memegang peranan penting dalam peningkatan rasa memiliki masyarakat untuk melindungi SDH di satu sisi dan memanfaatkan SDH untuk kesejahteraannya disisi yang lain.

⁸⁰ <http://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/2025>. Diakses pada 15 Mei 2018

3. Aspek kemampuan teknis untuk mengimplementasikan program REDD+ harus disiapkan oleh negara-negara anggota ASEAN, salah satunya terkait: system MRV, penghitungan REL/RL, Safeguard Information System, National Forest Management System.
4. Peningkatan kapasitas SDM juga harus menjadi prioritas. Peningkatan kapasitas difokuskan pada SDM pemerintah (nasional dan local), juga kapasitas masyarakat yang terlibat terutama dalam kaitannya dengan peningkatan taraf hidup mereka.
5. Isu lain yang mengemuka adalah mekanisme pembagian manfaat (benefit sharing mechanism). Masyarakat yang hidupnya tergantung pada SDH dan yang terkena dampak perubahan iklim harus mendapat bagian keuntungan dari program-program yang ada.
6. Strategi komunikasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat local, terutama dalam hal tingkat pendidikan, budaya, bahasa dsb merupakan suatu keharusan untuk kesuksesan diseminasi informasi terkait REDD+. Penggunaan bahasa lokal, pertunjukan budaya (wayang), program radio/TV perlu dipertimbangkan sebagai strategi penyampaian informasi.
7. Kerjasama dan kemitraan global tetap diperlukan. Negara-negara yang dikaruniai SDH yang melimpah dapat berkontribusi dalam upaya global mengatasi perubahan iklim melalui implementasi REDD+. Kemitraan sangat penting untuk percepatan terbentuknya arsitektur pendanaan perubahan iklim dunia.

Meski pada dasarnya pelibatan masyarakat telah ditentukan, akan tetapi dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat dirasa kurang. Undang-Undang Kehutanan telah lama dianggap tidak efektif di Indonesia, kurang memberikan ruang bagi partisipasi publik serta masih menyisakan sejumlah celah yang sering memperburuk situasi, alih-alih memecahkannya.

Selain itu Masih belum adanya basis dukungan signifikan untuk pelaksanaan konservasi hutan dari kalangan birokrasi yang lebih luas dan masyarakat Indonesia secara umum, ditambah dengan kuatnya lobi dari konglomerat, pengusaha minyak sawit dan industri ekstraktif di dalam arena politik juga menjadi faktor signifikan yang dapat menyebabkan inisiatif REDD+ mundur ke belakang.⁸¹

5.1.2 Limitation

Kegiatan Sosial Kerjasama United Nations REDD Program dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Transfer teknologi oleh REDD

Transfer teknologi adalah suatu terminologi yang menyelaraskan kegiatan transfer teknologi dari suatu negara industri maju ke negara berkembang. Sehingga biasa diartikan merupakan suatu acara membantu negara-negara berkembang untuk membangun industri dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan. Melalui Agenda 21 kegiatan tersebut juga diperuntukkan agar negara-negara berkembang yang dibantu dapat melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa merusak lingkungan melalui

⁸¹ Cecilia Luttrell et al., "The Political Context of REDD+ in Indonesia : Constituencies for Change," *Environmental Science and Policy* 35, 2014, 67-75. 2015

transfer teknologi produksi bersih. Kegiatan tersebut dikenal sebagai “kerjasama teknologi” yang ditujukan tidak hanya untuk kepentingan pembangunan negara-negara berkembang tersebut untuk lebih kompetitif tetapi juga dapat membantu mengembangkan teknologi di negaranegara berkembang. Terminologi teknologi disini untuk memperlihatkan jenis teknologi yang kompleks, sophisticated, padat modal dan tidak padat karya.⁸²

Transfer teknologi dilaksanakan dengan:⁸³

- a. Melakukan redesign teknologi untuk mengurangi pencemaran dan konsumsi sumberdaya
- b. Melakukan inovasi teknologi yang menghasilkan produk baru dengan dampak terhadap lingkungan yang kecil dan pengurangan penggunaan sumberdaya melalui recovery limbah dan recycle
- c. Melakukan proses yang lebih meningkatkan nilai tambah sehingga mengurangi tekanan ekonomi terhadap sumberdaya yang sudah over exploited

Hal tersebut jelas lebih memperhatikan faktor teknologinya daripada faktor-faktor sosial politik. Belum lagi jenis teknologi yang ditransfer yang kurang sesuai dengan kebutuhan negara-negara berkembang. Aspek struktur sosial dan budaya kurang diperhatikan dalam kegiatan transfer teknologi karena fokus lebih ditekankan pada masalah-masalah paten, biaya dan akses terhadap informasi.

⁸² Beder S. The Nature of Sustainable Development, Scribe Publications, Newham, Australia. 1996

⁸³ Tabor A. North-South Environmental Technology Transfer : A critical Analysis in Interactions and Actions, Ecologist VI Proceedinga, ed. Ian Thomas, RMIT, Melbourne. 1993

Kegiatan transfer teknologi ke negara-negara berkembang selain keberhasilan cukup banyak menghasilkan ketidaksuksesan, khususnya dalam aspek transfer pengetahuan untuk operasi dan pemeliharaan. Banyak terjadi, penduduk setempat yang tidak dapat mengoperasikan peralatan yang dibangun, bahkan lebih buruk lagi mereka memang tidak berkeinginan untuk belajar karena kurang sesuai dengan kebiasaan setempat. Belum lagi, transfer teknologi dilakukan melalui pembangunan peralatan/teknologi yang berbahaya terhadap lingkungan.

2. Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dalam Indonesia *Forest Climate Alliance* dan UNFCCC

Indonesia telah terlibat aktif di tingkat internasional sebagai salah satu negara peratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protocol Kyoto. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) dan termasuk dalam negara Non-Annex I. Dengan demikian Indonesia secara resmi terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang ditawarkan UNFCCC atau Kerangka Kerja PBB dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut.⁸⁴

⁸⁴ <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/komitmen-indonesia>. Diakses pada 14 Mei 2018.

5.2 Triple Bottom Line

5.2.1 Social

Kegiatan Sosial Kerjasama United Nations REDD Program dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dalam program REDD

Konsep REDD pada akhirnya akan mengantarkan pada peluang kerja sama bagi negara berkembang yang memiliki hutan luas untuk mendapatkan bantuan finansial dari negara industri atau negara maju untuk mengelola hutannya. Hal ini juga menjadi satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan melalui program Redd salah satunya adalah dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal melalui kerjasama yang dilakukan. Hal ini memungkinkan terjadi karena program Redd sebagai upaya pengelolaan hutan tentunya membutuhkan tenaga sebagai pelaksana program itu sendiri. Apalagi Hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo dan hutan-hutan ini memiliki kekayaan hayati yang unik.⁸⁵

Tipe-tipe hutan utama di Indonesia berkisar dari hutan-hutan Dipterocarpaceae dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampai hutan-hutan monsun musiman dan padang savana di Nusa Tenggara, serta hutan-hutan non-Dipterocarpaceae dataran rendah dan kawasan alpin di Irian Jaya (kadang juga disebut Papua). Indonesia

⁸⁵ FWI/GFW. 2001. Keadaan Hutan Indonesia. Bogor , Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch. 2001

juga memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia. Luasnya diperkirakan 4,25 juta hektar pada awal tahun 1990-an.⁸⁶ Keadaan ini tentu akan mendorong semakin tingginya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga bukan tidak mungkin serapan tenaga kerja pada pelaksanaan program Redd juga semakin besar.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa program Redd dapat menjadi satu langkah strategi pemerintah dalam mengelola hutan, karena melalui program Redd pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan dua permasalahan sekaligus yang cukup meresahkan yaitu mengurangi angka pengangguran dan penurunan deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia yang tercatat telah menyumbang emisi sebanyak 17% dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di dunia.⁸⁷

Dengan demikian, guna mengatasi kerusakan hutan yang semakin parah dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk membantu meminimalisir dampak yang lebih serius. Mengingat hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁸⁸

Analisis IFCA membagi penggunaan hutan konservasi yang dapat sekaligus dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia adalah dengan membuat (1) perkebunan kelapa sawit, (2) melakukan perubahan hutan alam menjadi tanaman untuk bubur kayu dan kertas/ hutan

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Badan Pengelola REDD+ Indonesia, *Pertanyaan BP REDD dan Implementasinya di Indonesia*, diakses dalam <http://www.reddplus.go.id/tentang-redd/pertanyaan-bp-redd-dan-implementasinya-di-Indonesia>

⁸⁸ Pasal 1 ayat UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

tanaman industri, (3) pengelolaan hutan alam produksi, (4) pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung serta (5) pemanfaatan hutan/lahan gambut.⁸⁹

2. Menerapkan sistem kesetaraan antara masyarakat dan NGO

Program REDD+ yang dilakukan di Indonesia untuk penerapan sistem kesetaraan antara masyarakat dan NGO adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan penguasaan lahan dan hak karbon

Departemen Kehutanan telah memberikan izin untuk penebangan dan perkebunan yang mencakup puluhan juta hektar hutan dengan sedikit perhatian terhadap hukum adat.⁹⁰ Dalam beberapa tahun terakhir, langkah-langkah telah diambil untuk lebih baik memasukkan hak-hak masyarakat adat dalam hubungannya dengan pengelolaan hutan. Ada peningkatan minat di dalam Pemerintah Indonesia untuk mengatasi konflik penguasaan tanah. Tindakan segera diusulkan oleh Satuan Tugas REDD + selama Konferensi Internasional tentang Kepemilikan di Lombok pada bulan Juli 2011.

Strategi Nasional REDD + menyarankan penguatan UU Kehutanan no. 41/1999, yang memberikan Negara hak penuh atas lahan hutan. Ini berarti bahwa Kementerian Kehutanan memiliki wewenang untuk memutuskan tenurial hutan untuk masyarakat, termasuk melalui pemberian konsesi atau izin penerbitan dan lisensi untuk eksploitasi dan budidaya hutan⁹¹.

⁸⁹ FORDA, 2008

⁹⁰ Forest Peoples Programme, 2011

⁹¹ Costenbader, 2011

Program UN-REDD telah mendukung pengembangan pedoman nasional untuk Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dan telah memulai proses PADIATAPA untuk provinsi percontohan Sulawesi Tengah (UN-REDD, 2011c). Bersama dengan Dewan Kehutanan Nasional, UN-REDD juga telah merilis rekomendasi kebijakan untuk penggunaan FPIC di masyarakat adat dan lokal.

2. Pengelolaan hutan

Indonesia telah mengembangkan ketentuan untuk berbagi manfaat dari proyek-proyek REDD+ antara berbagai tingkat pemerintahan, pengembang proyek dan komunitas lokal. Peraturan tersebut menetapkan bagaimana pembagian manfaat bervariasi sesuai dengan tipe hutan di mana proyek percontohan REDD+ berada. Namun, ini ditolak oleh Kementerian Keuangan dan karena itu ambiguitas tetap di atas pengaturan untuk pembagian keuntungan⁹².

Pada 20 Mei 2011, Instruksi Presiden (PI) no. 20/2011 tentang Penangguhan Penerbitan Izin Baru dan Peningkatan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut (moratorium) diterbitkan. Kebijakan ini melihat penangguhan penerbitan izin baru untuk konversi kawasan hutan dan lahan gambut terpilih. PI no. 10/2011 dirilis dengan peta indikatif terlampir (pada skala 1: 19.000.000) yang menunjukkan area hutan primer dan lahan gambut yang ditutupi oleh moratorium. PI no. 10/2011 membutuhkan revisi peta setiap enam bulan, dengan serangkaian peta indikatif yang telah dipublikasikan sejak pada resolusi

⁹² Costenbader, 2011

spasial yang lebih baik. Periode moratorium akan berakhir pada Mei 2013, tetapi diperkirakan akan diperpanjang selama dua tahun⁹³.

3. MRV

Suatu sistem untuk Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) di Indonesia saat ini sedang dibentuk di bawah Satuan Tugas REDD + Nasional. Lembaga MRV akan dibentuk untuk mengembangkan kebijakan, standar, dan mekanisme kerja untuk MRV yang sesuai dengan keputusan UNFCCC dan disetujui oleh Badan REDD +, serta untuk mengkoordinasikan kegiatan MRV (Satgas REDD Indonesia, 2012). Untuk membantu dalam proses ini, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) membantu Kementerian Kehutanan dengan pengembangan peta jalan MRV untuk Satuan Tugas REDD +. Peta jalan ini mencakup informasi tentang tugas-tugas yang diperlukan dan entitas yang mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Pada tingkat provinsi, Program UN-REDD mengembangkan beberapa kegiatan yang relevan dengan MRV termasuk pelatihan Penginderaan Jauh dan Inventarisasi Hutan di Sulawesi Tengah bersama dengan Universitas Tadulako (Palu) dan Inventarisasi Hutan Nasional (NFI) yang baru. Program ini juga menguji pendekatan pemantauan lahan satelit untuk mengidentifikasi kategori penggunaan lahan di Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah, dengan maksud untuk menggunakan teknologi serupa di tingkat nasional.

⁹³ Surowidjojo, 2013

4. Safeguards

Strategi Nasional REDD + menekankan perlunya kepatuhan terhadap perlindungan di tiga wilayah untuk menjaga integritas fidusia, lingkungan dan sosial (Satgas REDD + Indonesia, 2012). Strategi ini menyoroti tiga bidang kerja utama: perumusan prinsip, kriteria dan kerangka kerja kerangka pengaman; perumusan prosedur evaluasi dan penerapan kerangka pengaman; dan dimasukkannya indikator perlindungan ke dalam sistem MRV. Strategi Nasional REDD + juga mencakup isu-isu seperti penguasaan lahan, tata kelola, keanekaragaman hayati dan FPIC⁹⁴.

5. Kesetaraan gender

Proyek REDD + yang memberikan penekanan khusus pada penanganan kesetaraan gender adalah proyek Cagar Biodiversitas Cadangan Rimba Raya. Menurut Dokumen Desain Proyek (PDD) standar Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati (CCB), salah satu tujuan utama proyek ini adalah mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, misalnya, melalui pemerataan pekerjaan.

5.2.2 Economic

REDD+ tidak hanya mencakup pengurangan gas rumah kaca tetapi juga mencantumkan peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkepanjangan, dan peningkatan stok hutan karbon. Skema ini akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan

⁹⁴ Satgas REDD + Indonesia

ekonomi berkelanjutan. Proses penerapan REDD+ menitikberatkan pada keterlibatan para pemangku kepentingan. Suara dari masyarakat, penduduk asli dan komunitas tradisional harus dijadikan pertimbangan untuk memastikan hak mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan akan terjamin⁹⁵.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjalankan suspensi dua tahun bagi pelepasan izin baru bagi hutan primer dan lahan gambut, yang dikenal juga sebagai moratorium. Jeda dua tahun ini diatur oleh Presiden dalam Instruksi Presiden No 10/2011, dan akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengkaji pertumbuhan ekonomi dan implikasinya terhadap sumber daya alam. Selama jeda ini, Indonesia akan mengupayakan agar implikasi tersebut semakin berkurang dan turut mencari jalan keluar, terlepas dari skema bisnis seperti biasa, menuju jejak langkah pembangunan yang baru⁹⁶.

1. Menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Adapun program yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah konservasi dan rehabilitasi. Dalam lingkup konservasi dan rehabilitasi, sub program yang dilakukan adalah memantapkan fungsi kawasan lindung, mengendalikan koncensi hutan dan lahan gambut, restorasi hutan rehabilitasi gambut⁹⁷. Makna dari memantapkan fungsi kawasan hutan lindung adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan

⁹⁵ Ditjen PPI-KLHK, Pertanyaan Seputar REDD+ dan Implementasi REDD+ di Indonesia, diakses di <http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-ppi/33-beranda/1804-faq> pada 24 April 2018

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Ditjen PPI-KLHK, Pertanyaan Seputar REDD+ dan Implementasi REDD+ di Indonesia, diakses di <http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-ppi/33-beranda/1804-faq> pada 24 April 2018

Hutan, yaitu dengan merubah atau menetapkan hutan sebagai kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, tamna witasa alam dan taman buru⁹⁸. Sedangkan makna dari restorasi hutan rehabilitasi gambut adalah dengan melakukan pembahasan gambut, revegetasi, revitalisasi sumber mata pencaharian, desa peduli gambut dan generasi muda peduli desa gambut sejahtera (GMPDGS)⁹⁹.

Selain program konservasi dan rehabilitasi, pemerintah Indonesia juga melakukan pengembangan di bidang pertanian, kehutanan dan pertambangan yang berkelanjutan. diantaranya adalah meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan, mengelola hutan secara lestari, mengendalikan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan, mengendalikan konvensi lahan untuk tambang terbuka.

2. Melakukan program secara efisien

Efektivitas dipengaruhi oleh penetapan basis dalam beberapa hal. Jika penetapan basis terlalu ketat, keuntungan yang diperoleh bisa terlalu kecil dan tidak pasti sehingga suatu negara tidak tertarik untuk berpartisipasi. Sebagai contoh, negara-negara yang berada pada transisi hutan tahap awal (laju deforestasi rendah dan hutan yang luas) akan merugi jika basis ditetapkan berdasarkan sejarah deforestasi mereka yang begitu ketat. Pemberian basis yang lebih longgar mungkin diperlukan

⁹⁸ Humas. Inilah Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Diakses di <http://setkab.go.id/inilah-tata-cara-perubahan-fungsi-kawasan-hutan/> 2016. pada 24 April 2018

⁹⁹ Badan Restorasi Gambut, diakses di <https://brg.go.id/tugas-dan-fungsi-brg/#> pada 24 April 2018

untuk memikat lebih banyak negara, tetapi secara bersamaan juga meningkatkan risiko kredit semu/hot air.¹⁰⁰

3. Berkolaborasi dengan masyarakat adat sehingga tidak menghilangkan identitas kultural

Bank Dunia berjuang untuk memastikan bahwa organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) dan organisasi masyarakat adat secara aktif berpartisipasi dalam forum-forum konsultasi dan acara-acara pembelajaran. Kami memakai kebijakan dan instrumen tindakan pengaman yang spesifik untuk memastikan bahwa implementasi dari program-program REDD+ di masa depan tidak akan menyebabkan dampak-dampak yang merugikan dan akan memaksimalkan manfaat-manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan hidup. Pendanaan hibah dari FCPF dan pendanaan lain juga tengah digunakan untuk mendukung mitra-mitra OMS, seperti Telapak, untuk melaksanakan studi mengenai, dan membangun kapasitas dari, masyarakat adat. Kebanyakan upaya REDD+ tengah berada pada tahap rancangan dan persiapan, bukan implementasi. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menjadi sebuah contoh bagaimana Bank Dunia bekerja dengan masyarakat lokal dalam sebuah pendekatan pembangunan yang berbasis komunitas.

Pada tingkat teknis, telah muncul pula sejumlah aturan penting, seperti Permenhut 62/2013 yaitu pengaturan mengenai hutan adat dalam proses pengukuhan kawasan hutan dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 98 tahun 2013 yang dikawal proses pembuatannya oleh

¹⁰⁰ CIFOR. Diakses di <https://www.nature.or.id/publikasi/laporan-dan-panduan-kehutanan/modul-konsep-redd.pdf>. 2010. pada 24 April 2018

Unit Kerja Presiden Untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bersama dengan Kementerian Pertanian.

Pemerintah Indonesia telah memasukkan isu masyarakat hukum adat ke dalam berbagai perangkat hukum, namun perlu implementasi nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Jika dikaitkan dengan upaya menurunkan emisi, BP REDD+ memandang kita tidak bisa menurunkan emisi namun menafikan bahwa hutan dan isinya adalah suatu sistem yang holistik. Bagi REDD+, soal tenurial adalah sebuah keharusan.

4. Menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat lokal

Berbagai manfaat yang diberikan hutan kepada manusia mendorong pemerintah untuk lebih tanggap mengatasi permasalahan hutan yang kian mengancam kehidupan. Indonesia telah menaruh perhatian terhadap isu perubahan iklim dan menganggapnya sebagai isu strategis sejak kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal tersebut ditandai dengan keikutsertaan Indonesia untuk meratifikasi UNFCCC melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNFCCC. Walaupun begitu, Indonesia belum banyak melakukan tindakan yang berarti karena masih disibukkan dengan permasalahan domestik. Namun, ratifikasi tersebut telah menjadi bukti komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim.

Adapun program yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah konservasi dan rehabilitasi. Dalam lingkup konservasi dan rehabilitasi, sub program yang dilakukan adalah memantapkan fungsi kawasan lindung, mengendalikan konsentrasi hutan dan lahan gambut, restorasi hutan

rehabilitasi gambut.¹⁰¹ Makna dari memantapkan fungsi kawasan hutan lindung adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yaitu dengan merubah atau menetapkan hutan sebagai kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, tamna witasa alam dan taman buru.¹⁰² Sedangkan makna dari restorasi hutan rehabilitasi gambut adalah dengan melakukan pembahasan gambut, revegetasi, revitalisasi sumber mata pencaharian, desa peduli gambut dan generasi muda peduli desa gambut sejahtera (GMPDGS).¹⁰³

Selain program konservasi dan rehabilitasi, pemerintah Indonesia juga melakukan pengembangan di bidang pertanian, kehutanan dan pertambangan yang berkelanjutan. diantaranya adalah meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan, mengelola hutan secara lestari, mengendalikan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan, mengendalikan konvensi lahan untuk tambang terbuka. Berbagai upaya ini dilakukan untuk membantu msyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang sehat. Apalagi banyak masyarakat Indonesia meskipun jumlahnya tidak diketahui secara pasti, yang tinggal di dalam atau di pinggir hutan atau hidupnya bergantung pada hutan. Angka estimasi yang dibuat selama beberapa dekade yang lalu sangat bervariasi dari 1,5 sampai 65 juta orang

¹⁰¹ Ditjen PPI-KLHK, Pertanyaan Seputar REDD+ dan Implementasi REDD+ di Indonesia, diakses di <http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-ppi/33-beranda/1804-faq> pada 24 April 2018

¹⁰² Humas. Inilah Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Diakses di <http://setkab.go.id/inilah-tata-cara-perubahan-fungsi-kawasan-hutan/>. 2016 diakses pada 24 April 2018

¹⁰³ Badan Restorasi Gambut, diakses di <https://brg.go.id/tugas-dan-fungsi-brg/#> pada 24 April 2018

bergantung pada definisi mana yang digunakan dan agenda kebijakan mana yang diikuti.¹⁰⁴

5. Membuka partisipasi yang luas bagi masyarakat

Upaya pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi hutan melalui program REDD+ memberikan beberapa lesson learned dan catatan kritis dalam pelaksanaannya, yakni: Pertama, yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah pemahaman yang sama mengenai REDD+ antara seluruh pihak yang bersangkutan, karena saat ini masih terdapat banyak ketimpangan pemahaman mengenai REDD+¹⁰⁵. Hal ini penting untuk menjamin adanya langkah-langkah yang sinergis dan saling melengkapi antara masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kedua, kendala terkait hutan adat yang harusnya diberikan hak pengelolaannya kepada masyarakat adat yang telah diakui keberadaannya¹⁰⁶. Pelaksanaan pelibatan konservasi hutan pasti akan melibatkan masyarakat hukum adat, dimana untuk mempermudah pelaksanaan konservasi tersebut, maka harusnya pemerintah daerah bersedia memberikan pengakuan terhadap keberadaan mereka.

5.2.3 Environment

Kegiatan Environmental Kerjasama United Nations REDD Programme dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Undang-Undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi

¹⁰⁴ Zerner, Charles, "Legal Options for The Indonesian Forestry Sector", Field Document No. VI-4 FAO The United Nation. 1990

¹⁰⁵ Jusuf, Jenny, "Eksklusif: Implementasi REDD+ di Indonesia", <http://iklimkarbon.com/2010/09/20/eksklusifimplementasi-redd-di-indonesia/>, diakses 7 Maret 2018.

¹⁰⁶ Emila, "Permasalahan Land Tenure dalam Persiapan Implementasi REDD: Antara Kebijakan dan Realitas", Warta Tenure, Juli 2010.

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan dasar hukum dan acuan dalam pengurusan hutan dan konservasi sumber daya alam secara lestari di Indonesia. Undang-undang kehutanan tersebut mengamanatkan bahwa penguasaan hutan oleh Negara, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pengurusan kawasan hutan Indonesia yang terdiri atas hutan negara (termasuk di dalamnya hutan adat) dan hutan hak dengan luas mencapai hampir 60% luas daratan Indonesia, menjadi kewenangan Departemen Kehutanan.

Penyusunan program REDD+ yang akan dilakukan oleh pemerintah di Indonesia didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan secara makro (bersifat eksternal) maupun mikro wilayah (bersifat internal) berdasarkan isu-isu strategis yang berhubungan dengan deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Kerangka strategi REDD + dibangun untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dijabarkan sebagai berikut : (1) Menurunkan emisi GRK yang berasal dari sektor penggunaan lahan dan perubahannya serta kehutanan; (2) Meningkatkan simpanan karbon; (3) Meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati; dan (4) Meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi ekonomi hutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka program strategi REDD + menekankan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang tertuang dalam bentuk kebijakan strategis pengelolaan sumberdaya alam Indonesia yaitu¹⁰⁷ :

¹⁰⁷ Hermansah, Hermansah, dkk. Strategi dan Rencana Aksi Daerah untuk Implementasi REDD+. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/295860391>. 2013

- a. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Nagari (PELANA) dengan dukungan kearifan lokal
- b. Pengembangan Ekonomi Hijau (BANGAU) dengan mengedepankan penggunaan teknologi ramah lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan
- c. Penatagunaan Lahan Berbasis Nagari (TAHAN) sebagai bagian resolusi konflik terhadap pemanfaatan lahan
- d. Rehabilitasi dan Mitigasi Bencana (RELAMINA) dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan hidup

Berbagai keuntungan tersebut tentunya menjelaskan sejauhmana dampak yang dapat dirasakan dengan adanya program UN-Redd+ khususnya bagi sektor lingkungan. Elkington menjelaskan 3 indikator yang dapat menjadi faktor penilaian dari dimensi enviroemntal. Ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan lingkungan yang sehat bagi umat manusia

Adanya program UN-Redd+ khususnya pada sektor lingkungan digunakan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi umat manusia. Dinamika perubahan stok karbon dari suatu kawasan inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam skema ReDD+. Sepanjang waktu pengelolaan berbagai jenis kawasan tersebut terjadi dinamika penurunan stok karbon karena ada emisi karbon dan atau terjadi peningkatan stok karbon melalui penyerapan (sequestration/ removal) karbon. Di dalam skema ReDD+ masing-masing tipologi hutan dan kawasan itu minimal harus dipertahankan stok karbon dasarnya (baseline). Bagi kawasan yang masih

diatas batas defenisi hutan stok karbonnya harus dijaga atau ditingkatkan. Sedangkan kawasan yang stok karbonnya dibawah batas definisi hutan harus meningkatkannya melalui berbagai upaya antara lain penanaman hutan sehingga selama jangka waktu tertentu akan terjadi penambahan (selisih dengan delta positif) dari proses mengemisi dan penyerapan karbon di kawasan itu.

Dalam skema ReDD+ hutan yang masih bagus stok karbonnya harus dipertahankan dan ini dapat terjadi bila dilakukan konservasi terhadap hutan-hutan virgin (intact forest) yang ada. Pada hutan klimaks yang tidak terganggu stok karbonnya telah maksimal dan telah terjadi kesimbangan antara proses emisi dengan proses penyerapan secara alamiah. Fluktuasi plus-minus emisi yang besar dapat saja terjadi secara alamiah bila ada bencana, akan tetapi kemudian dapat pulih kembali dalam waktu yang relatif singkat sampai terjadi keseimbangan lagi.

Dengan demikian adanya program ReDD+ akan membantu menciptakan keadaan lingkungan yang sehat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Salah satunya dengan mendapatkan oksigen yang baik, mengurangi gas emisi, serta mendapatkan kebutuhan air bersih yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup setiap harinya. Hal tersebut dapat diciptakan melalui program ReDD+.

2. Melakukan penghematan dalam penggunaan energi terbarukan

Program ReDD+ membantu untuk menciptakan sudut pandang masyarakat untuuk melakukan berbagai macam upaya dalam menggunakan energi khususnya pada energi tak terbarukan atau yang lebih kita kenal

dengan sebutan Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya, serta meningkatnya nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, serta kenyamanan. Organisasi-organisasi serta perseorangan dapat menghemat biaya dengan melakukan penghematan energi, sedangkan pengguna komersial dan industri dapat meningkatkan efisiensi dan keuntungan dengan melakukan penghematan energi.

Selain itu, diharapkan melalui Program REDD+ memiliki dampak yang positif khususnya dalam melakukan penghematan energi merupakan bagian penting dari mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Penghematan energi sering merupakan cara paling ekonomis dalam menghadapi kekurangan energi, dan merupakan cara yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan meningkatkan produksi energi.

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa program REDD++ di Indonesia dapat dikatakan sudah efektif. Namun dengan perjalanan program yang efektif ini harus terus dikembangkan keberhasilannya agar hutan Indonesia kembali menjadi asri dan lestai agar dapat dinikmati oleh anak cucu di masa depan. Programme yang telah berlangsung di

Indonesia antara tahun 2009-2012 efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Hal tersebut dapat dilihat dari serangkaian indikator pada konsep sustainable development. Selanjutnya, Teori Triple Bottom Line dan juga memiliki konsep dalam sustainable development mencakup dalam 1) bidang sosial yaitu, Pengendalian Deforestasi oleh REDD, dan Pelibatan masyarakat dalam program-program REDD 2) bidang ekonomi dengan adanya Pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dalam program REDD, Menerapkan sistem kesetaraan antara masyarakat dan NGO, Menciptakan keamanan di lingkungan program, dan Memperhatian pendidikan dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi program-program REDD, 3) bidang Environment mencakup dalam hal Menciptakan lingkungan yang sehat bagi umat manusia, Melakukan penghematan dalam penggunaan energi terbarukan, dan Mendorong pemerintah untuk melakukan konservasi sumber daya alam tak terbarukan.

Berdasarkan penjabaran dari berbagai program yang dilakukan di Indonesia yang terkait dengan REDD+ adalah sudah berjalan namun masih kurang efektif karena beberapa faktor. Diantaranya adalah kurangnya dukungan dari masyarakat seluruh Indonesia mengenai perbaikan fungsi dan manfaat hutan bagi kehidupan berkelanjutan dan juga waktu yang masih kurang lama dalam melakukan program tersebut.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang ditemukan dalam penelitian ini terkait dengan Kerjasama antara Indonesia dan United Nations REDD Programme. Bentuk program United Nations REDD pada periode tahun 2009-2012 yang dilakukan sudah dikatakan efektif namun memerlukan waktu yang cukup panjang dan lama agar sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai aktor lain selain pemerintah dapat mendapatkan informasi dan sosialisasi yang maksimal. Selain itu faktor penghambat seperti adanya aktivitas manusia yang dapat merusak hutan agar terhindar dan diminimalisir oleh semua aktor dari REDD.

6.2. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan, memperluas pemahaman dan dapat memberikan masukan dalam hal kerjasama Kerjasama United Nations REDD Programme. Hasil pengetahuan ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian khususnya terkait pembahasan kerjasama REDD di Indonesia.

Peneliti secara sadar sangat menyadari kekurangan penelitian yang telah disusun, dari awal penulisan skripsi hingga peneliti mendapatkan hasil dari apa yang telah diteliti. Peneliti menyarankan apabila dilakukan penelitian lanjutan sebaiknya diberikan tambahan informasi atau data yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wendt, Alexander et.al. 2014. *“Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif”*. (terjemahan). Malang. Intrans Publishing.

E-Book

Giorgio Budi Indrarto *et al.* The context of REDD+ in Indonesia. Center for International Forestry Research. 2012

Gupta, Joyeeta et.al. (eds) 2013. *“Climate Change, Forest, and REDD: Lesson for Institutional Design”*. Routledge. New York. p.3

Implementasi Mekanisme REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah. UN-REDD Programme Indonesia. Page: 13

John Vogler. *Environmental Issues. Memahami Fenomena Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia*. UN REDD Programme Indonesia.

Memahami Fenomena Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia. UN REDD Programme Indonesia. <http://redd-indonesia.org/index.php/regulasi/dinamika-redd>

Tatyana P. Soubotina. *Beyond Economic Growth: An Introduction to Sustainable Development* Second Edition. 2004: Washington, D.C. The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.

William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo. Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia:

Jurnal

Bossel, Hartmut. (1999). *“Indicators for Sustainable Development: Theory, Methods, Applications”* A Report to the Balaton Group. International Institute for Sustainable Development

Brundtland Commission. *Report of the World Commission on Environment and Development*. 1987. United Nations.

Chichinisky, Graciela. 1997. *“What Is Sustainable Development?”*. Land Economics, Vol.73, No.4, Defining Sustainability. University of Wisconsin Press.

Data dan Informasi Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Departemen Kehutanan. 2002

Elkington, John B. 1997. *“Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business”*

Evenstad, Ane et al. (eds) 2013. *“II. Country Cases: Indonesia, Tanzania, Brazil”* Insight From The Field. Norwegian REDD Research Network [online] dalam <http://www.sum.uio.no/english/research/publications/2013/brief-2-countries.pdf> diakses pada 19 April 2017

Lima et.al dalam Gupta (eds) 2013. *“Climate Change, Forest, and REDD: Lesson for Institutional Design”*. Routledge. New York. p.124

Mwakalobo et.al. 2011. REDD Working Papers: REDD and sustainable development – perspective from Tanzania IIED, London.

- Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya Center for International Forestry Research Maret 1997. Occasional Paper No. 9. Hal. 1
- Robinson, John et.al.2006. "*Climate Change and Sustainable Development: Realizing the Opportunity*". Ambio, Vol. 35, No.1 (Feb 2006) p.3
- Social Safeguards in REDD: A Review of Possible Mechanisms to Protect the Rights and Interests of Indigenous and Forest-Dependent Communities in a Future System for REDD. McGill journal Volume 6: Issue 1 (2010)
- Simon Dalby. *Chapter 18: Environmental Change*.
- Tatyana P. Soubbotina. Beyond Economic Growth: An Introduction to Sustainable Development Second Edition. 2004: Washington, D.C. The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank. Page: 9-10
- UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD). FAO, UNDP, UNEP Framework Document. 20 June 2008
- William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo. *Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya*. Center for International Forestry Research Maret 1997. Occasional Paper No. 9

Artikel Online

- Profil REDD Indonesia. UN REDD Programme. dalam <http://www.un-redd.org/CountryActions/Indonesia/tabid/987/language/en-US/Default.aspx>. diakses tanggal 20 Juni 2014
- Top Ten Countries with Highest Deforestation <http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/countries-with-highest-deforestation-map.html>. diakses tanggal 20 Juni 2014
- Tiga Tahun Berjalan, Pelaksanaan Moratorium Hutan Belum Optimal. Kompas.<http://sains.kompas.com/read/2014/05/22/1936582/Tiga.Tahun.Berjalan.Pelaksanaan.Moratorium.Hutan>. diakses tanggal 21 Juni 2014
- <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/10/central-sulawesi-briefing-4.pdf> <http://www.un-redd.org/CountryActions/Indonesia/tabid/987/language/en-US/Default.aspx>
- Top Ten Countries with Highest Deforestation <http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/countries-with-highest-deforestation-map.html>. diakses tanggal 20 Juni 2014
- Profil REDD Indonesia. UN REDD Programme. <http://www.un-redd.org/CountryActions/Indonesia/tabid/987/language/en-US/Default.aspx>. diakses pada 20 Juni 2014

Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang

- Perpres No. 46/2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim
- Permenhut No. 2 tahun 2008 tentang pelaksanaan proyek percontohan REDD
- Permenhut No. 30 tahun 2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan REDD
- Permenhut No.36 tahun 2009 tentang Prosedur Perijinan REDD

PP No. 10/2010 tentang Penetapan Wilayah dan Prosedur Perubahan Fungsi Hutan. Sejak dimulai pada Oktober 2009

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim

Undang-Undang No 16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris.

UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960 tentang perempuan.

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 98 tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNFCCC.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Undang-Undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

